



**BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
PERWAKILAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**LAPORAN KINERJA
PERWAKILAN BPKP D.I.Y
TRIWULAN I TAHUN 2023**

PE.11.03/LPP - 36/PW12.6/2023

12 April 2023



Nomor : PE.11.03/LPP-36/PW12.6/2023 12 April 2023
Lampiran : Tiga Eksemplar
Hal : Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta s.d. triwulan I tahun 2023

Yth. Kepala Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta
di tempat

Berikut kami sampaikan laporan kinerja Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta s.d. triwulan I tahun 2023.

1. Dasar Penugasan

Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta Nomor PE.11.02/ST- 218/PW12/6/2022 Tanggal 30 Maret 2023.

2. Pencapaian Target *Outcome* sesuai Perjanjian Kinerja

a. Pengawasan

Sesuai dengan Perjanjian Kinerja tahun 2023, Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta mempunyai 36 indikator kinerja kegiatan (IKK). Sampai dengan triwulan I tahun 2023 capaian kinerja diuraikan sebagai berikut:

1) IKK: Nilai Optimalisasi Penerimaan Daerah yang Terealisasi

Belum ada realisasi Nilai Optimalisasi Penerimaan Daerah yang Terealisasi s.d. triwulan I tahun 2023.

Target IKK “Nilai Optimalisasi Penerimaan Daerah yang Terealisasi” pada tahun 2023 sebesar Rp2.494.000.000,00. Belum ada realisasi s.d. triwulan I tahun 2023.

IKK “Nilai Optimalisasi Penerimaan Daerah yang Terealisasi” diukur dengan jumlah kurang bayar penerimaan daerah (pajak dan retribusi) yang sudah disetorkan/ditetapkan atas hasil kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta.

Perbandingan target dan realisasi IKK “Nilai Optimalisasi Penerimaan Daerah yang Terealisasi” dapat dilihat pada Grafik 1.



2) IKK: Nilai Efisiensi Pengeluaran Negara dan Daerah

Nilai Efisiensi Pengeluaran Negara/ Daerah s.d. triwulan I tahun 2023 sebesar Rp127.383.300.866,00

Target IKK “Nilai Efisiensi Pengeluaran Negara dan Daerah” pada tahun 2023 adalah sebesar Rp136.261.000.000,00, Sampai dengan triwulan I tahun 2023 telah terealisasi sebesar Rp127.383.300.866,00 atau 93,48% dari target tahun 2023 sebesar Rp136.261.000.000,00.

Jika dibandingkan dengan target akhir Renstra periode tahun 2020-2024 sebesar Rp112.939.000.000,00 maka capaian nilai efisiensi pengeluaran negara/daerah Sampai dengan triwulan I tahun 2023 telah tercapai 112,79%. IKK “Nilai Efisiensi Pengeluaran Negara dan Daerah” diukur dengan nilai pengurangan/pengalihan rencana belanja proyek/program/kegiatan yang tidak tepat.

Perbandingan target dan realisasi IKK “Nilai Efisiensi Pengeluaran Negara dan Daerah” dapat dilihat pada Grafik 2.



Realisasi Nilai Efisiensi Pengeluaran Negara dan Daerah sebesar Rp127.383.300.866,00 merupakan hasil dari penugasan Evaluasi atas Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pemilu dan Pemilihan tahun 2023 dan 2024 pada Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Komisi Pemilihan Umum berupa temuan potensi tidak efektif dan tidak efisien yang dilakukan pada tiga Pemerintah Daerah [REDACTED] :



3) IKK: Nilai Penyelamatan Keuangan Negara dan Daerah

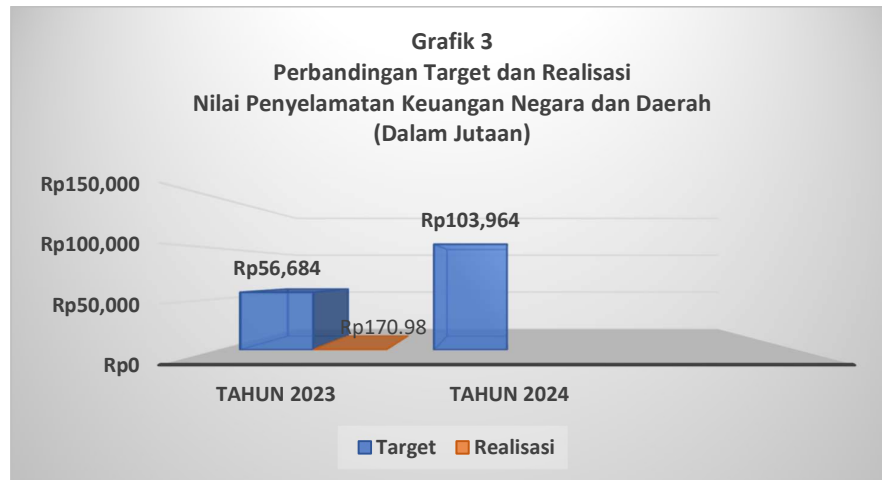
Target IKK “Nilai Penyelamatan Keuangan Negara dan Daerah” pada tahun 2023 adalah sebesar Rp56.684.000.000,00. Sampai dengan triwulan I tahun 2023 telah terealisasi sebesar Rp170.979.349,00 atau 0,30% dari target tahun 2023 sebesar Rp56.684.000.000,00.

Nilai Penyelamatan Keuangan Negara dan Daerah Sampai dengan triwulan I tahun 2023 sebesar Rp170.980.000,00

Jika dibandingkan dengan target akhir Renstra periode tahun 2020-2024 sebesar Rp103.964.000.000,00 maka capaian nilai penyelamatan keuangan negara dan daerah s.d. triwulan I tahun 2023 telah tercapai 0,16%.

IKK “Nilai Penyelamatan Keuangan Negara dan Daerah” diukur dengan nilai belanja yang dikembalikan ke Kas Negara/Daerah termasuk denda dari hasil pengawasan Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta dan nilai aset yang dipulihkan.

Perbandingan target dan realisasi “Nilai Penyelamatan Keuangan Negara dan Daerah” dapat dilihat pada Grafik 3.



4) IKK: Jumlah Proyek Strategis Nasional (PSN) yang Tercapai Sesuai Target

Jumlah Proyek Strategis Nasional yang Tercapai Sesuai Target Sampai dengan triwulan I tahun 2023 sejumlah 1 PSN

Target IKK “Jumlah Proyek Strategis Nasional (PSN) yang Tercapai Sesuai Target” pada tahun 2023 sebanyak 1 PSN. Sampai dengan triwulan I tahun 2023 sudah terealisasi sebanyak 1 PSN atau 100,00% dari target tahun 2023 sebanyak 1 PSN.

Jika dibandingkan dengan target akhir Renstra periode tahun 2020-2024 sebanyak 1 PSN maka capaian “Jumlah Proyek Strategis Nasional (PSN) yang Tercapai Sesuai Target” Sampai dengan triwulan I tahun 2023 telah tercapai 100,00%.

IKK “Jumlah Proyek Strategis Nasional (PSN) yang Tercapai Sesuai Target” diukur dengan jumlah PSN yang tercapai target atas total jumlah PSN yang dilakukan pengawasan.

Perbandingan target dan realisasi “Jumlah Proyek Strategis Nasional (PSN) yang Tercapai Sesuai Target” dapat dilihat pada Grafik 4.



PSN yang tercapai sesuai target yaitu: PSN Pembangunan Infrastruktur Bandara Udara Internasional Yogyakarta pada PT. Angkasa Pura I (Persero).

5) IKK: Persentase Hambatan Pelaksanaan Pembangunan yang Diselesaikan

Belum ada realisasi Persentase Hambatan Pelaksanaan Pembangunan yang Diselesaikan s.d. triwulan I tahun 2023.

Target IKK “Persentase Hambatan Pelaksanaan Pembangunan yang Diselesaikan” pada tahun 2023 adalah sebesar 85,00%. Belum ada realisasi sampai dengan triwulan I tahun 2023.

Hambatan kelancaran pembangunan (HKP) adalah sebuah kondisi dimana proses pembangunan tidak dapat mencapai *output*, *outcome*, dan manfaat yang ditetapkan karena adanya masalah yang tidak dapat diselesaikan dengan menggunakan kewenangan para pihak terkait. IKK Persentase hambatan pelaksanaan pembangunan yang diselesaikan diukur dengan jumlah laporan evaluasi hasil kelancaran pembangunan (LEHKP) yang kesepakatannya terlaksana dibagi dengan total penugasan EHKP yang diterbitkan. Perbandingan target dan realisasi “Persentase Hambatan Pelaksanaan Pembangunan yang Diselesaikan” dapat dilihat pada Grafik 5.



6) IKK: Jumlah Kegiatan Pembangunan Prioritas Daerah yang Diawasi

Jumlah Kegiatan Pembangunan Prioritas Daerah yang Diawasi Sampai dengan triwulan I tahun 2023 sejumlah 1 kegiatan

Target IKK “Jumlah Kegiatan Pembangunan Prioritas Daerah yang Diawasi” pada tahun 2023 adalah sebesar 2. Sampai dengan triwulan I tahun 2023 telah terealisasi sebesar 1 atau 50% dari target tahun 2023.

IKK “Jumlah Kegiatan Pembangunan Prioritas Daerah yang Diawasi” diukur dengan jumlah topik pengawasan yang tertuang dalam Agenda Prioritas Pengawasan Daerah (APPD) pada tahun berjalan.

Jika dibandingkan dengan target akhir Renstra periode tahun 2020-2024 sebanyak 9 kegiatan maka capaian “Kegiatan Pembangunan Prioritas Daerah yang Diawasi” Sampai dengan triwulan I tahun 2023 telah tercapai 0,11%.

Perbandingan target dan realisasi IKK “Jumlah Kegiatan Pembangunan Prioritas Daerah yang Diawasi” dapat dilihat pada Grafik 6.



7) IKK: Persentase Rekomendasi Strategis yang Ditindaklanjuti

Belum ada realisasi Persentase Rekomendasi Strategis yang Ditindaklanjuti s.d. triwulan I tahun 2023.

Target IKK “Persentase Rekomendasi Strategis yang Ditindaklanjuti” pada tahun 2023 adalah sebesar 80%. Belum ada realisasi s.d. triwulan I tahun 2023.

IKK “Persentase rekomendasi strategis yang ditindaklanjuti” diukur dengan jumlah rekomendasi strategis yang ditindaklanjuti dibagi total rekomendasi strategis pada laporan gubernur tahun sebelumnya.

Perbandingan target dan realisasi IKK “Persentase Rekomendasi Strategis yang Ditindaklanjuti” dapat dilihat pada Grafik 7.



8) IKK: Jumlah BUMD dengan Pengelolaan Korporasinya Baik

Jumlah BUMD dengan Pengelolaan Korporasinya Baik Sampai dengan triwulan I tahun 2023 sejumlah 1 BUMD

Target IKK “Jumlah BUMD dengan Pengelolaan Korporasinya Baik” pada tahun 2023 sebanyak 1 BUMD. Sampai dengan triwulan I telah terealisasi sebanyak 1 BUMD atau telah tercapai 100,00% dari target tahun 2023 atau mencapai 50% dari akhir

Renstra 2020-2024 sejumlah 2 BUMD. Realisasi tersebut merupakan hasil evaluasi GCG tahun 2022

Perbandingan target dan realisasi “Jumlah BUMD dengan Pengelolaan Korporasinya Baik” dapat dilihat pada Grafik 8.

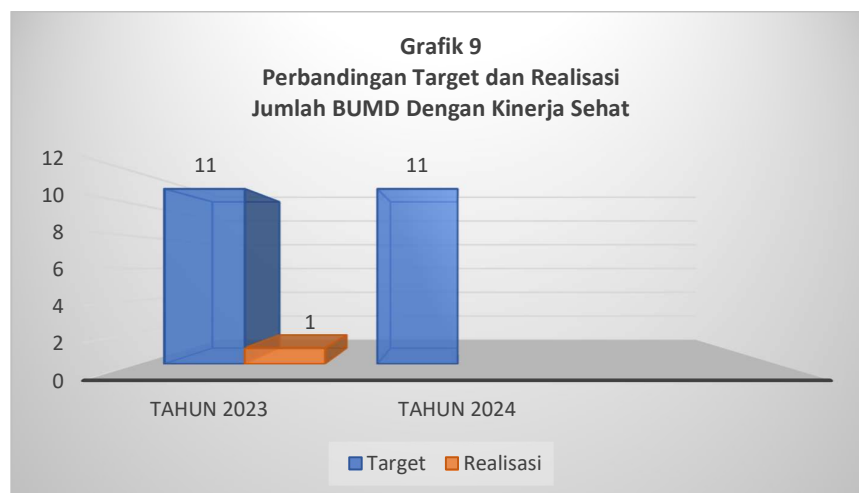


9) IKK: Jumlah BUMD dengan Kinerja Sehat

Jumlah BUMD dengan Kinerja Sehat s.d. triwulan I tahun 2023 sejumlah 1 BUMD

Target IKK “Jumlah BUMD dengan Kinerja Sehat” pada tahun 2023 sebanyak 11 BUMD. Sampai dengan triwulan I telah terealisasi sebanyak 1 BUMD atau telah tercapai 9,09% dari target tahun 2023 maupun target akhir Renstra2020-2024 sejumlah 11 BUMD.

IKK “Jumlah BUMD dengan Kinerja Sehat” diukur dari jumlah BUMD dengan kinerja sehat dari hasil evaluasi kinerja yang dilakukan oleh BPKP ataupun *assessor* lainnya berdasarkan kriteria penilaian mencapai kategori “Sehat”. Perbandingan target dan realisasi “Jumlah BUMD dengan Kinerja Sehat” dapat dilihat pada Grafik 9.



10) IKK: Jumlah BLUD dengan Kinerja Sehat

Belum ada realisasi Jumlah BLUD dengan Kinerja Sehat s.d. triwulan I tahun 2023.

Target IKK “Jumlah BLUD dengan Kinerja Sehat” pada tahun 2023 sebanyak 2 BLUD. Sampai dengan triwulan I tahun 2023 belum ada realisasi.

IKK “Jumlah BLUD dengan Kinerja Sehat” diukur dari jumlah BLUD dengan kinerja sehat dari hasil evaluasi kinerja yang dilakukan oleh BPKP ataupun *assessor* lainnya berdasarkan kriteria penilaian mencapai kategori “Sehat”.

Perbandingan target dan realisasi “Jumlah BLUD dengan Kinerja Sehat” dapat dilihat pada Grafik 10.

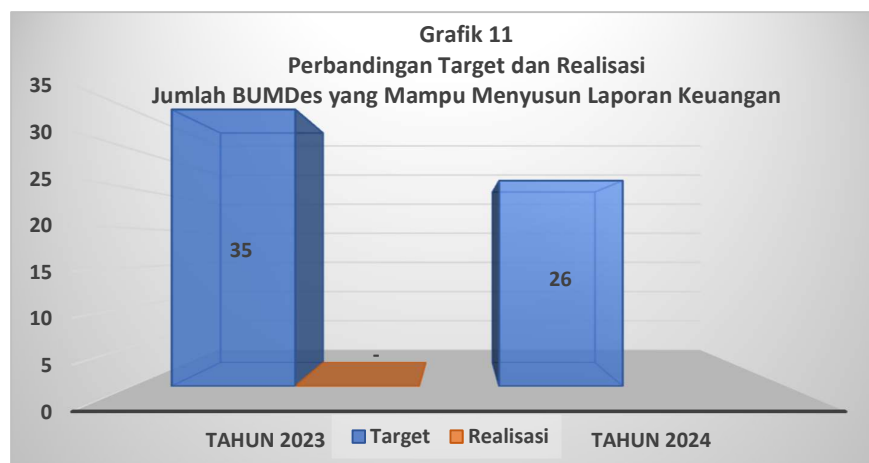


11) IKK : Jumlah BUMDes yang Mampu Menyusun Laporan

Belum ada realisasi Jumlah BUMDes yang Mampu Menyusun Laporan s.d. triwulan I tahun 2023.

Target IKK “Jumlah BUMDes yang Mampu Menyusun Laporan” pada tahun 2023 sebanyak 35 BUMDes. Sampai dengan triwulan I tahun 2023 belum ada realisasi.

Perbandingan target dan realisasi “Jumlah BUMDes yang Mampu Menyusun Laporan Keuangan” dapat dilihat dalam Grafik 11.



12) IKK: Jumlah BUMDes yang Memberikan Kontribusi pada Perekonomian Desa

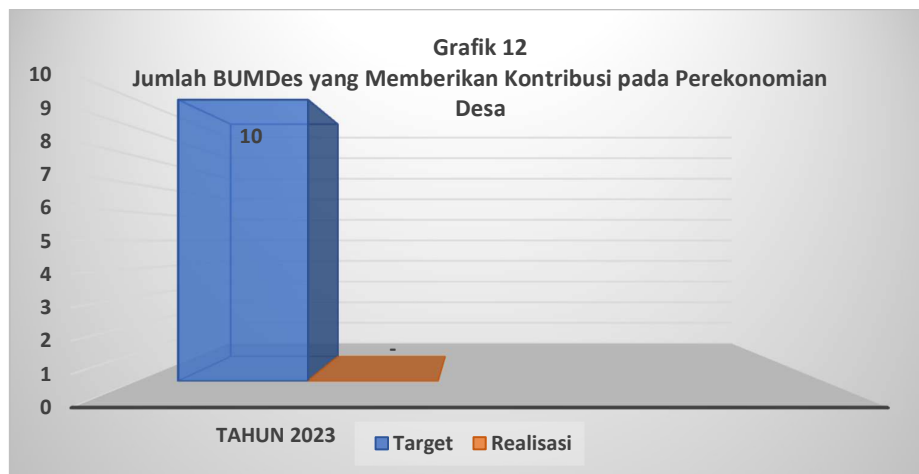
Belum ada realisasi Jumlah BUMDes yang Memberikan Kontribusi pada Perekonomian Desa s.d. triwulan I tahun 2023.

Target IKK “Jumlah BUMDes yang Memberikan Kontribusi pada Perekonomian Desa” pada tahun 2023 adalah 10 BUMDes. Belum ada realisasi s.d. triwulan I tahun 2023.

IKK “Jumlah BUMDes yang Memberikan Kontribusi pada Perekonomian Desa” diukur dengan menghitung jumlah BUMDes yang mampu memberikan kontribusi pada perekonomian desa pada tahun yang bersangkutan.

Realisasi IKK ini tidak dapat dibandingkan dengan akhir periode Renstra tahun 2020-2024, dikarenakan target ini baru muncul pada tahun 2022.

Perbandingan target dan realisasi “Jumlah BUMDes yang Memberikan Kontribusi pada Perekonomian Desa” dapat dilihat dalam Grafik 12.



13) IKK: Persentase Hasil Pengawasan Represif yang Dimanfaatkan/ Ditindaklanjuti

Belum ada realisasi Persentase Hasil Pengawasan Represif yang Dimanfaatkan/ Ditindaklanjuti s.d. triwulan I tahun 2023.

Target IKK “Persentase Hasil Pengawasan Represif yang Dimanfaatkan/Ditindaklanjuti” pada tahun 2023 adalah 100%, sampai dengan triwulan I tahun 2023 belum ada realisasi.

Pengawasan BPKP Bidang Investigasi yang bersifat represif dalam konteks untuk pengendalian korupsi meliputi pelaksanaan audit investigatif, audit penghitungan kerugian keuangan negara (PKKN), dan pemberian keterangan ahli.

IKK “Persentase Hasil Pengawasan Represif yang Dimanfaatkan/ Ditindaklanjuti” diukur dengan jumlah KLPBU/APH yang

menindaklanjuti rekomendasi jumlah penugasan pengawasan dibagi dengan jumlah pengawasan represif.

Perbandingan target dan realisasi "Persentase Hasil Pengawasan Represif yang Dimanfaatkan/Ditindaklanjuti" dapat dilihat dalam Grafik 13.



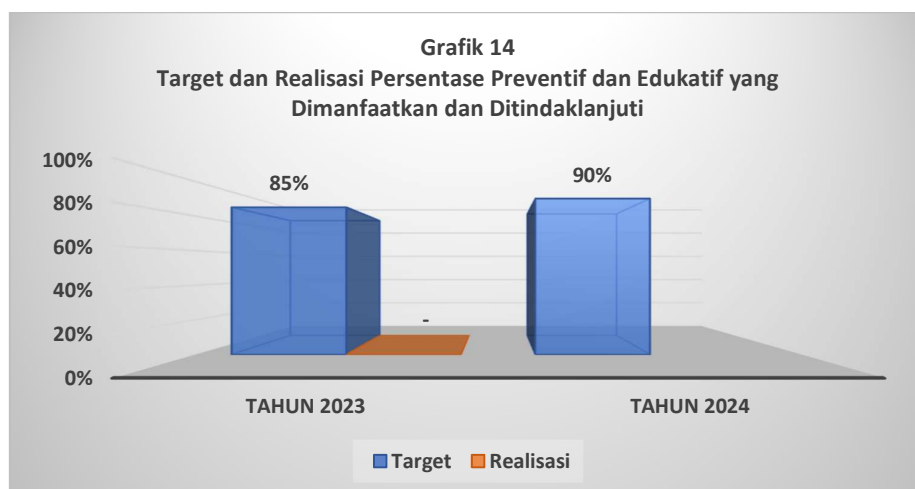
14) IKK: Persentase Hasil Pengawasan Preventif dan Edukatif yang Dimanfaatkan/Ditindaklanjuti

Belum ada realisasi Persentase Hasil Pengawasan Preventif dan Edukatif yang Dimanfaatkan/Ditindaklanjuti s.d. triwulan I tahun 2023.

Target IKK "Persentase Hasil Pengawasan Preventif dan Edukatif yang Dimanfaatkan/Ditindaklanjuti" pada tahun 2023 sebesar 85%. Belum ada realisasi s.d. triwulan I tahun 2023.

Kinerja efektivitas hasil pengawasan ini diukur dengan menghitung hasil pengawasan edukatif dan preventif yang dimanfaatkan/ditindaklanjuti dengan penugasan pengawasan preventif/edukatif yang telah dilaksanakan.

Perbandingan target dan realisasi "Persentase Hasil Pengawasan Preventif dan Edukatif yang Dimanfaatkan/Ditindaklanjuti" dapat dilihat pada Grafik 14.



15) IKK: Jumlah Pemda dengan Efektivitas Pengendalian Korupsi Baik

Jumlah Pemda dengan Efektivitas Pengendalian Korupsi Baik Triwulan I tahun 2023 sebanyak 8 Pemda

Target IKK “Jumlah Pemda dengan Efektivitas Pengendalian Korupsi Baik” pada tahun 2023 sebanyak tiga Pemda. Sampai dengan triwulan I tahun 2023 sudah terealisasi sebanyak 8 Pemda atau tercapai 266,67% dari target tahun 2023 dan 100% dari target akhir periode Renstra 2020-2024. Realisasi IKK tersebut



IKK “Jumlah Pemda dengan Efektivitas Pengendalian Korupsi Baik” diukur dengan menghitung skor indeks efektivitas pengendalian korupsi yang merupakan komposit skor atas tiga pilar, yaitu: kapabilitas pengelolaan risiko korupsi, penerapan strategi pencegahan, dan penanganan kejadian korupsi dengan minimal 3,00.

Perbandingan target dan realisasi “Jumlah Pemda dengan Efektivitas Pengendalian Korupsi Baik” dapat dilihat pada Grafik 15.



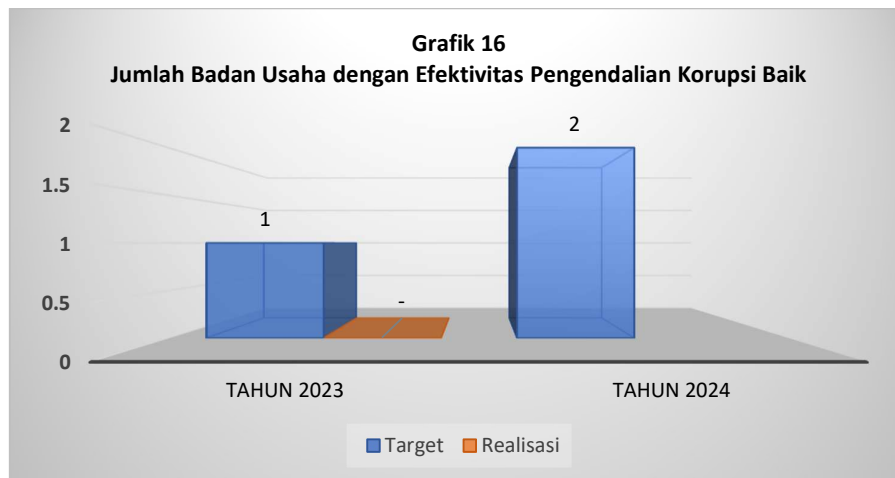
16) IKK: Jumlah Badan Usaha dengan Efektivitas Pengendalian Korupsi Baik

Belum ada realisasi Jumlah Badan Usaha dengan Efektivitas Pengendalian Korupsi Baik s.d. triwulan I tahun 2023 sebanyak 8

Target IKK “Jumlah Badan Usaha dengan Efektivitas Pengendalian Korupsi Baik” pada tahun 2023 sebanyak satu Badan Usaha. Belum ada realisasi s.d. triwulan I tahun 2023.

IKK “Jumlah Badan Usaha dengan Efektivitas Pengendalian Korupsi Baik” diukur dengan menghitung skor indeks efektivitas pengendalian korupsi yang merupakan komposit skor atas tiga pilar, yaitu: kapabilitas pengelolaan risiko korupsi, penerapan strategi pencegahan, dan penanganan kejadian korupsi dengan minimal 3,00.

Perbandingan target dan realisasi “Jumlah Badan Usaha dengan Efektivitas Pengendalian Korupsi Baik” dapat dilihat pada Grafik 16.



17) IKK: Jumlah APIP Provinsi dengan Kapabilitas APIP \geq Level 3

Jumlah APIP K/L/P dengan Kapabilitas APIP \geq Level s.d. triwulan I tahun 2023 sebanyak 1 APIP

Target IKK “Jumlah APIP Provinsi dengan Kapabilitas APIP \geq Level 3” pada tahun 2023 sebanyak 1 APIP. Sampai dengan triwulan I tahun 2023 telah mencapai 100,00% dari target tahun 2023 maupun akhir Renstra tahun 2020-2024 sebanyak 1 APIP.

Realisasi berdasarkan evaluasi kapabilitas APIP pada Inspektorat Daerah D.I. Yogyakarta tahun 2022 sesuai Laporan Nomor PE.09.03/LHP-418/PW12/6/2022 tanggal 30 November 2022 yang telah mencapai level 3

IKK “Jumlah APIP Provinsi dengan Kapabilitas APIP \geq Level 3” diukur berdasarkan hasil penetapan level kapabilitas APIP dari hasil evaluasi yang dilaksanakan oleh BPKP. Target dan realisasi IKK “Jumlah APIP Provinsi dengan Kapabilitas APIP \geq Level 3” bersifat kumulatif.

Perbandingan target dan realisasi “Jumlah APIP Provinsi dengan Kapabilitas APIP \geq Level 3” dapat dilihat pada Grafik 17.



18) IKK: Jumlah APIP Kabupaten/Kota dengan Kapabilitas APIP \geq Level 3

Jumlah APIP Kabupaten/Kota dengan Kapabilitas APIP \geq Level 3 s.d. triwulan I tahun 2023 sebanyak 11 APIP

Target IKK “Jumlah APIP Kabupaten/Kota dengan Kapabilitas APIP \geq Level 3” pada tahun 2023 sebanyak 11 APIP. Sampai dengan triwulan I tahun 2023 telah mencapai 100,00% dari target tahun 2023 maupun akhir Renstra tahun 2020-2024 sebanyak 11 APIP. Realisasi tersebut berdasarkan penilaian

dengan pedoman Peraturan Kepala BPKP Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Penilaian Kapabilitas APIP.

Penilaian Kapabilitas APIP telah dilakukan evaluasi kembali pada tahun 2022 dengan menggunakan pedoman yang baru yaitu Peraturan BPKP Nomor 8 Tahun 2021 tanggal 19 November 2021 tentang Penilaian Kapabilitas APIP pada K/L/D.

IKK “Jumlah APIP Kabupaten/Kota dengan Kapabilitas APIP \geq Level 3” diukur berdasarkan hasil penetapan level kapabilitas APIP dari hasil evaluasi yang dilaksanakan oleh BPKP. Target dan realisasi IKK “Jumlah APIP Kabupaten/Kota dengan Kapabilitas APIP \geq Level 3” bersifat kumulatif.

Capaian sasaran kegiatan APIP Kabupaten/Kota yang sudah mencapai Kapabilitas APIP level 3 sebagaimana disajikan pada Tabel 2.



Perbandingan target dan realisasi “Jumlah APIP Kabupaten/Kota dengan Kapabilitas APIP \geq Level 3” dapat dilihat pada Grafik 18.



19) IKK: Jumlah Provinsi dengan Maturitas SPIP \geq Level 3

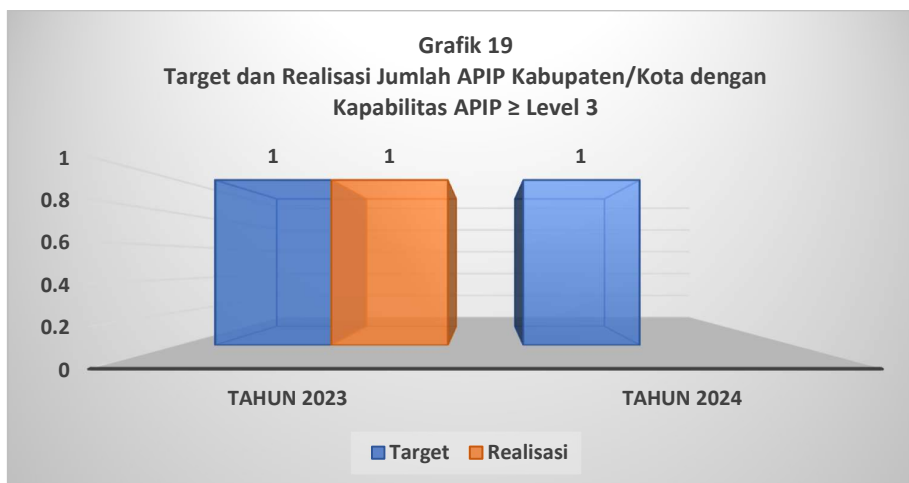
Jumlah Provinsi dengan Maturitas SPIP \geq Level 3 s.d. Triwulan I tahun 2023 sebanyak 1 Provinsi

Target IKK “Jumlah APIP Provinsi dengan Maturitas SPIP \geq Level 3” pada tahun 2023 sebanyak 1 Provinsi. Sampai dengan triwulan I tahun 2023 telah mencapai 100,00% dari target tahun 2023 maupun akhir Renstra tahun 2020-2024 sebanyak 1 Provinsi. Realisasi tersebut berdasarkan hasil evaluasi tahun 2022 dengan metode penilaian cepat dimana nilai skor Maturitas SPIP pada Pemerintah D.I. Yogyakarta sebesar 3,535.

IKK “Jumlah Provinsi dengan dengan Maturitas SPIP \geq Level 3” diukur berdasarkan hasil penetapan level Maturitas SPIP dari hasil evaluasi yang

dilaksanakan oleh BPKP. Target dan realisasi IKK “Jumlah Provinsi dengan dengan Maturitas SPIP \geq Level 3” bersifat kumulatif.

Perbandingan target dan realisasi IKK “Jumlah Provinsi dengan Maturitas SPIP \geq Level 3” dapat dilihat pada Grafik 19.



20) IKK: Jumlah Kabupaten/Kota dengan Maturitas SPIP \geq Level 3

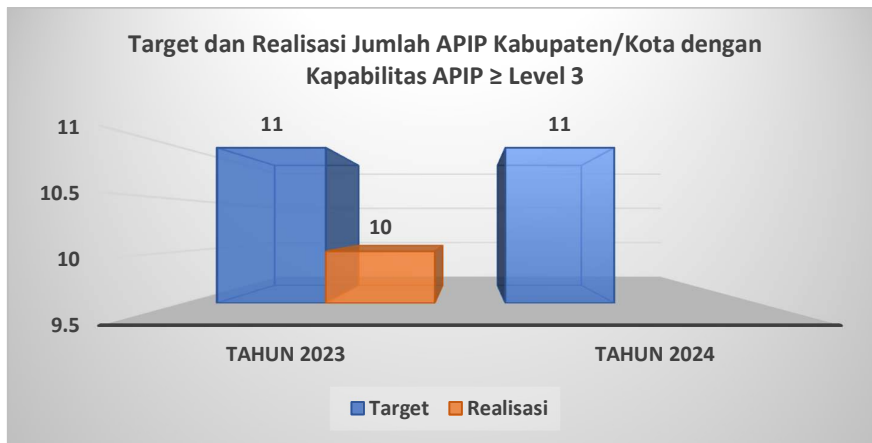
Jumlah Kabupaten/Kota dengan Maturitas SPIP \geq Level 3 Sampai dengan triwulan I tahun 2023 sebanyak 10 Kabupaten/Kota

Target IKK “Jumlah Kabupaten/Kota dengan Maturitas SPIP \geq Level 3” pada tahun 2023 sebanyak 11 Kabupaten/Kota. Realisasi s.d. triwulan I tahun 2023 sebanyak 10 atau mencapai 90,91% dari target tahun 2023 maupun akhir Renstra tahun 2020-2024 sebanyak 11 Kabupaten/Kota.

Capaian Jumlah Kabupaten/Kota dengan Maturitas SPIP \geq Level 3 sebanyak 10 Kabupaten/Kota dengan menggunakan penilaian Maturitas SPIP berdasarkan Peraturan Badan BPKP Nomor 5 Tahun 2021.

IKK “Jumlah Kabupaten/Kota dengan dengan Maturitas SPIP \geq Level 3” diukur berdasarkan hasil penetapan level Maturitas SPIP dari hasil evaluasi yang dilaksanakan oleh BPKP. Target dan realisasi IKK “Jumlah Kabupaten/Kota dengan dengan Maturitas SPIP \geq Level 3” bersifat kumulatif.

Perbandingan target dan realisasi IKK “Jumlah Kabupaten/Kota dengan Maturitas SPIP \geq Level 3” dapat dilihat pada Grafik 20.



21) IKK : Jumlah Provinsi dengan MRI ≥ Level 3

Target IKK “Jumlah Provinsi dengan MRI ≥ Level 3” pada tahun 2023 sebanyak 1 Provinsi. Sampai dengan triwulan I tahun 2023 telah mencapai 100,00% dari target tahun 2023 maupun akhir Renstra tahun 2020-2024 sebanyak 1 Provinsi. Realisasi tersebut berdasarkan hasil evaluasi tahun 2022 dengan metode penilaian cepat dimana nilai skor MRI pada Pemerintah D.I. Yogyakarta sebesar 3,250.

Jumlah Provinsi dengan MRI ≥ Level 3 Sampai dengan triwulan I tahun 2023 sebanyak 1 Provinsi

Perbandingan target dan realisasi IKK “Jumlah Provinsi dengan MRI ≥ Level 3” dapat dilihat pada Grafik 21.



22) IKK : Jumlah Kabupaten/Kota dengan MRI ≥ Level 3

Target IKK “Jumlah Kabupaten/Kota dengan MRI ≥ Level 3” pada tahun 2023 sebanyak 5 Kabupaten/Kota. Realisasi s.d. triwulan I tahun 2023 sebanyak 3 atau mencapai 60% dari target tahun 2023.

Jumlah Pemda Kabupaten/Kota dengan MRI ≥ Level 3 s.d. Triwulan I tahun 2023 sebanyak 3 Kabupaten/Kota

Perkembangan IKK “Jumlah Pemda Kabupaten/Kota dengan MRI \geq Level 3” dapat dilihat pada Grafik 22.



23) IKK: Jumlah Pemda yang Akuntabel dalam Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Daerah

Jumlah Pemda yang Akuntabel dalam Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Daerah Sampai dengan triwulan I tahun 2023 belum ada realisasi

Target IKK “Jumlah Pemda yang Akuntabel dalam Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Daerah” pada tahun 2023 sebesar 9 pemda. Belum ada realisasi s.d. triwulan I.

Pemda yang akuntabel (efisien dan efektif) dalam pengelolaan keuangan dan kinerja tercermin dari Opini LKPD WTP dan nilai evaluasi SAKIP minimal BB.

Indikator jumlah Pemda yang akuntabel dalam pengelolaan keuangan dan kinerja daerah diukur dengan menghitung jumlah Pemda yang memperoleh Opini LKPD WTP dan nilai evaluasi SAKIP minimal BB.

Perbandingan target dan realisasi IKK “Jumlah Pemda yang Akuntabel dalam Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Daerah” dapat dilihat pada Grafik 23.



24) IKK : Jumlah Desa yang Pengelolaan Keuangannya Akuntabel

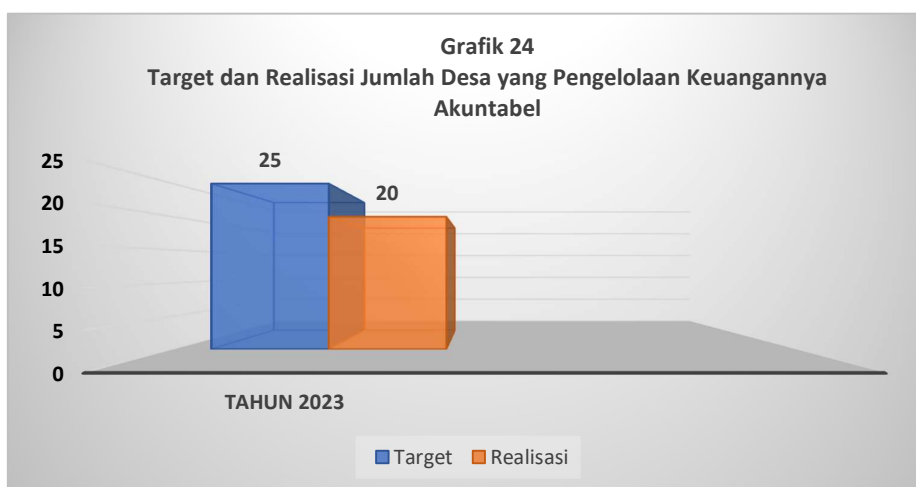
Jumlah Desa yang Pengelolaan Keuangannya Akuntabel Sampai dengan triwulan I tahun 2023 sebanyak 20 Desa (80%)

Target IKK “Jumlah Desa yang yang Pengelolaan Keuangannya Akuntabel” tahun 2023 sebanyak 25 desa. Realisasi “Jumlah Desa yang Pengelolaan Keuangannya Akuntabel” adalah sebanyak 20 desa atau mencapai 80% dari target tahun 2023. Realisasi tersebut merupakan pengawasan atas Akuntabilitas Keuangan Desa pada Kab. Bantul dan Kab. Gunungkidul.

Jumlah Desa yang Pengelolaan Keuangannya Akuntabel diukur dengan menghitung Jumlah Desa yang Pengelolaan Keuangannya Akuntabel.

IKK ini tidak dapat dibandingkan dengan capaian target akhir Renstra Tahun 2020-2024, karena merupakan IKK yang baru muncul di tahun 2022.

Perbandingan target dan realisasi IKK “Jumlah Desa yang Pengelolaan Keuangannya Akuntabel” dapat dilihat pada Grafik 24.



25) IKK: Jumlah Desa yang Menerapkan Pengelolaan Aset Desa Secara Memadai

Belum ada realisasi Jumlah Desa yang Menerapkan Pengelolaan Aset Desa Secara Memadai s.d. triwulan I tahun 2023.

Target IKK “Jumlah Desa yang Menerapkan Pengelolaan Aset Desa Secara Memadai pada tahun 2023 sebanyak 25 desa. Belum ada realisasi di triwulan I tahun 2023, namun realisasi s.d. triwulan I tahun 2023 dari realisasi tahun 2022 telah terealisasi sebesar 246 desa atau mencapai 984%. Jika dibandingkan dengan target akhir periode Renstra 2020-2024, IKK tersebut telah mencapai 48,14%.

Tabel 3
Desa yang Menerapkan Pengelolaan Aset Desa Secara Memadai

No	Kabupaten	Jumlah Desa
Tahun 2022		
1	Kabupaten Gunungkidul	120 Desa
2	Kabupaten Kebumen	107 Desa
	Jumlah Tahun 2022	227 Desa
Tahun 2021		
1	Kabupaten Kulon Progo	8 Desa
2	Kabupaten Sleman	11 Desa
	Jumlah Tahun 2021 dan 2022	246 Desa

IKK “Jumlah Desa yang yang Pengelolaan Keuangannya Akuntabel” diukur dengan menghitung jumlah desa yang telah menerapkan pengelolaan aset desa sesuai ketentuan berdasarkan pengujian atas pengendalian intern tata kelola aset desa.

Target dan realisasi Jumlah Desa yang Menerapkan Pengelolaan Aset Desa Secara Memadai bersifat kumulatif.

Perbandingan target dan realisasi IKK “Jumlah Desa yang Menerapkan Pengelolaan Aset Desa Secara Memadai ” dapat dilihat pada Grafik 25



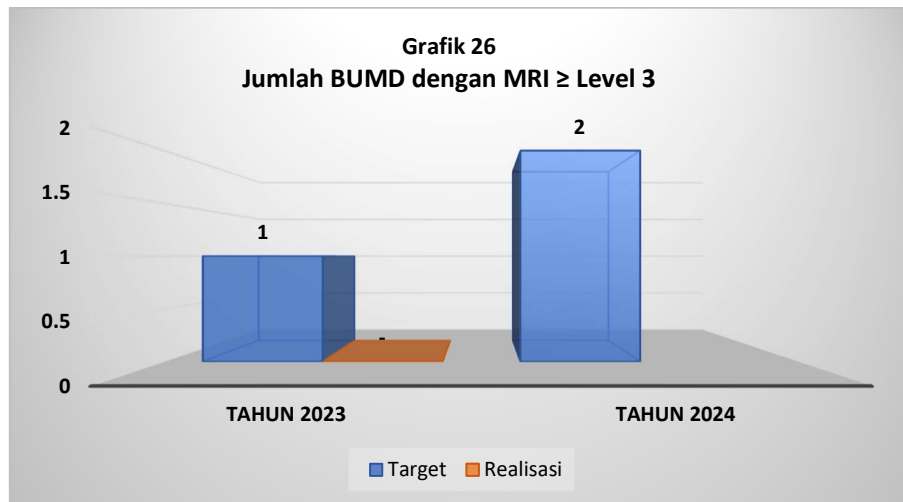
26) IKK: Jumlah BUMD dengan MRI \geq Level 3

Belum ada realisasi Jumlah BUMD dengan MRI \geq Level 3 s.d. Triwulan I tahun 2023 .

Target IKK “Jumlah BUMD dengan MRI \geq Level 3” pada tahun 2023 sebanyak 1 BUMD. Belum ada realisasi s.d. triwulan I tahun 2023.

IKK “Jumlah BUMD dengan MRI \geq Level 3” diukur dengan Jumlah BUMD yang berada pada maturitas MRI \geq Level 3.

Perbandingan Target dan Realisasi IKK “Jumlah BUMD dengan MRI \geq Level 3” dapat dilihat pada Grafik 26.



27) IKK: Jumlah BLUD dengan MRI \geq Level 3

Jumlah BLUD dengan MRI \geq Level 3 s.d. triwulan I tahun 2023 sebanyak 4 BLUD

Target IKK “Jumlah BLUD dengan MRI \geq Level 3” pada tahun 2023 sebanyak 5 BLUD. Realisasi s.d. triwulan I tahun 2023 sebanyak 4 atau mencapai 80% dari target tahun 2023.

IKK “Jumlah BLUD dengan MRI \geq level 3” diukur dengan Jumlah BLUD yang mengimplementasikan pengelolaan/manajemen risiko.

Perbandingan Target dan Realisasi IKK “Jumlah BLUD dengan MRI \geq Level 3” dapat dilihat pada Grafik 27.



28) IKK: Jumlah BUMD dengan kapabilitas SPI \geq Level 3

Jumlah BUMD dengan kapabilitas SPI \geq Level 3 Sampai dengan triwulan I tahun 2023 sebanyak 1 BUMD

Target IKK “Jumlah BUMD dengan kapabilitas SPI \geq Level 3” pada tahun 2023 sebanyak 2 BUMD. Realisasi s.d. triwulan I tahun 2023 sebanyak 1 BUMD atau mencapai 50% dari target tahun 2023.

Jumlah BUMD dengan kapabilitas SPI \geq Level 3 diukur dengan Jumlah BUMD yang melaksanakan peran SPI dengan kapabilitas SPI \geq Level 3.

Perbandingan Target dan Realisasi IKK “Jumlah BUMD dengan Kapabilitas SPI \geq Level 3” dapat dilihat pada Grafik 28.



29) IKK Jumlah BLU/D dengan Kapabilitas SPI \geq Level 3

Jumlah BLU/D dengan Kapabilitas SPI \geq Level 3 s.d.Triwulan I tahun 2023 sebanyak 2 BLU/D

Target IKK “Jumlah BLU/D dengan Kapabilitas SPI \geq Level 3” pada tahun 2023 sebanyak 1 BLU/D. Realisasi s.d.triwulan I tahun 2023 sebanyak 2 BLU/D atau mencapai 200% dari target tahun 2023.

Jumlah BLU/D dengan kapabilitas SPI \geq Level 3 diukur dengan Jumlah BLU/D yang melaksanakan peran SPI dengan kapabilitas SPI \geq Level 3.

Target dan realisasi IKK “Jumlah BLU/D dengan Kapabilitas SPI \geq Level 3” dapat dilihat pada Grafik 29.



b. Pendukung Pengawasan

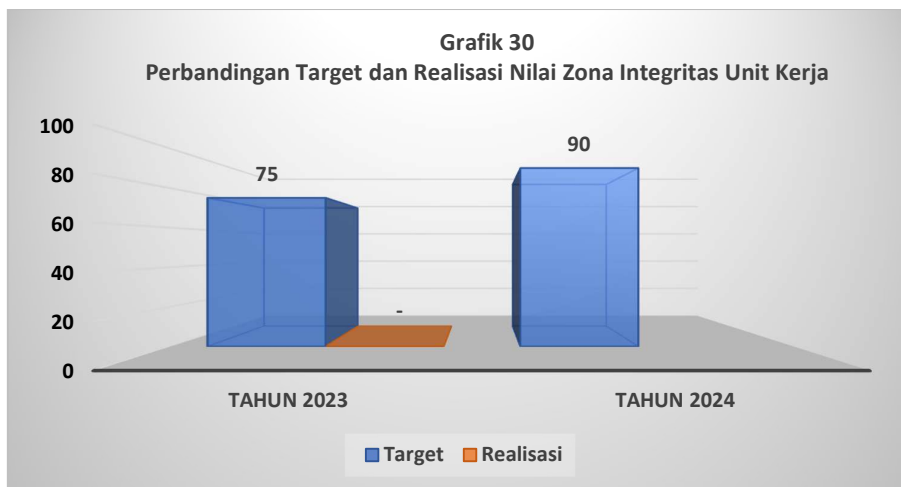
Sesuai dengan Perjanjian Kinerja tahun 2023, Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta mempunyai tujuh IKK dengan capaian kinerja diuraikan sebagai berikut:

1) IKK: Nilai Zona Integritas Unit Kerja

Belum ada realisasi Nilai Zona Integritas Unit Kerja s.d. triwulan I tahun 2023.

Target IKK “Nilai Zona Integritas Unit Kerja” tahun 2023 sebesar 75. Belum ada realisasi s.d. triwulan I tahun 2023. Nilai Skor Zona Integritas diukur sesuai dengan Pedoman Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas yang dikeluarkan oleh Kementerian PANRB.

Target dan realisasi IKK “Nilai Zona Integritas” dapat dilihat pada Grafik 30.

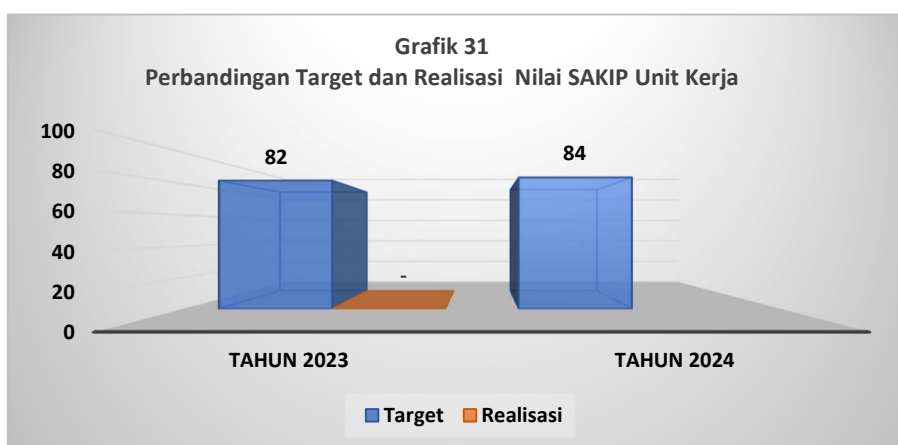


2) IKK: Nilai SAKIP Unit Kerja

Belum ada realisasi Nilai SAKIP Unit Kerja s.d. triwulan I tahun 2023.

Target IKK “Nilai SAKIP Unit Kerja” pada tahun 2023 sebesar 82. Belum ada realisasi s.d. triwulan I tahun 2023. Nilai SAKIP diukur dengan hasil *Self Assesment* SAKIP yang telah dilakukan *Quality Assurance* (QA) oleh Inspektorat BPKP. Hal ini dilakukan untuk menilai keselarasan antara perencanaan strategis di tingkat Eselon II dengan perencanaan strategis unit di bawahnya, terutama dalam hal keselarasan sasaran, indikator kinerja, program dan kegiatannya.

Target dan realisasi IKK “Nilai SAKIP Unit Kerja” dapat dilihat pada Grafik 31.



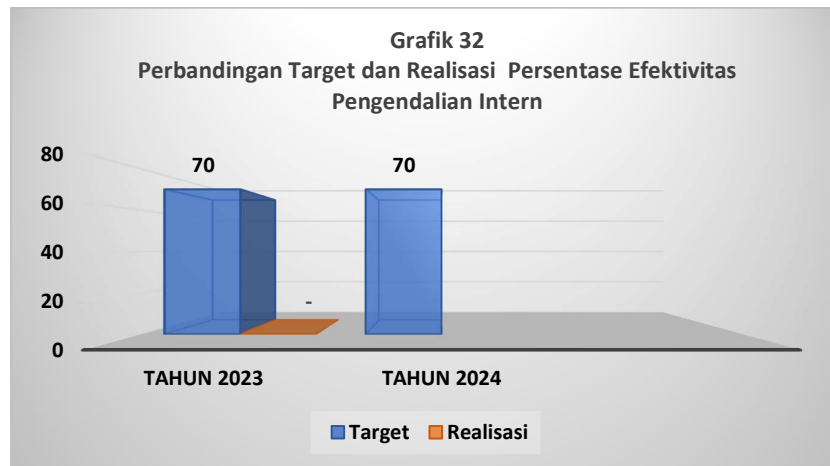
3) IKK: Persentase Efektivitas Pengendalian Intern (SPIP Unit Kerja)

Belum ada realisasi Persentase Efektivitas Pengendalian Intern (SPIP Unit Kerja) s.d. triwulan I tahun 2023.

Target IKK “Persentase Efektivitas Pengendalian Intern” pada tahun 2023 sebesar 70%. Belum ada realisasi s.d. triwulan I tahun 2023.

Efektivitas pengendalian intern dihitung dengan perhitungan $(\text{Jumlah pengendalian eksisting yang efektif} + \text{Jumlah RTP yang selesai dan efektif}) / (\text{Jumlah seluruh pengendalian eksisting} + \text{Jumlah RTP yang Selesai}) \times 100\%$.

Perbandingan target dan realisasi capaian IKK “Persentase Penyelesaian RTP” dapat dilihat pada Grafik 32.



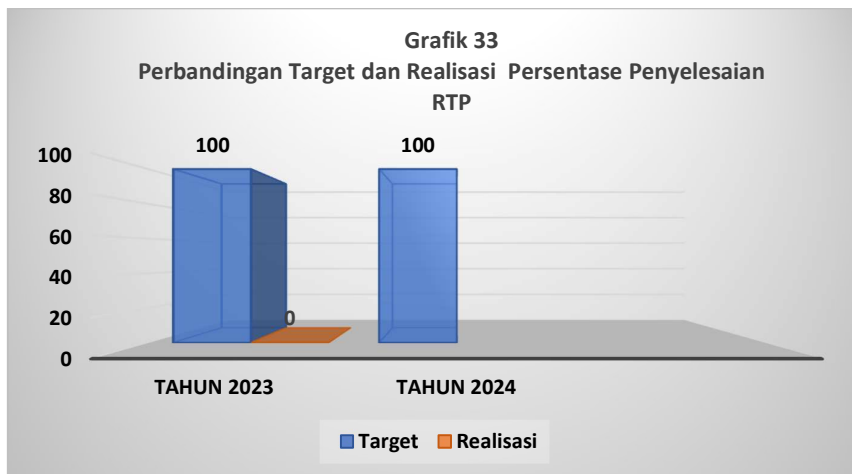
4) IKK: Persentase Penyelesaian RTP (MR Unit Kerja)

Belum ada realisasi Persentase Penyelesaian RTP (MR Unit Kerja) s.d. triwulan I tahun 2023.

Target IKK “Persentase Penyelesaian RTP” pada tahun 2023 sebesar 100%. Belum ada realisasi s.d. triwulan I tahun 2023.

Rencana Tindak Pengendalian (RTP) unit kerja dihitung berdasarkan jumlah RTP yang diselesaikan dibagi dengan jumlah RTP dikali 100%. Penilaian ini digunakan dalam rangka menilai penerapan manajemen risiko pada unit kerja. Berdasarkan aplikasi yang digunakan oleh unit kerja yaitu RMIS.

Perbandingan target dan realisasi capaian IKK “Persentase Penyelesaian RTP” dapat dilihat pada Grafik 33.



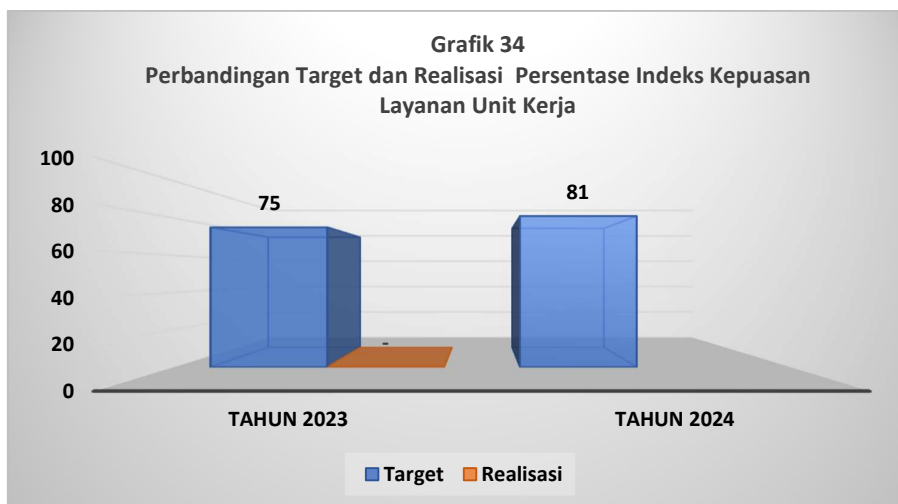
5) IKK: Indeks Kepuasan Layanan Unit Kerja

Belum ada realisasi Indeks Kepuasan Layanan Unit Kerja s.d. triwulan I tahun 2023.

Target IKK “Indeks Kepuasan Layanan Unit Kerja” pada tahun 2023 sebesar 75. Belum ada realisasi s.d. triwulan I tahun 2023.

Indeks kepuasan layanan unit kerja Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta diukur dengan hasil survei kepada para mitra di lingkungan unit kerja.

Perbandingan target dan realisasi IKK “Indeks Kepuasan Layanan Unit Kerja” dapat dilihat pada Grafik 34.



6) IKK: Skor IKPA Unit Kerja

Realisasi Skor IKPA Unit Kerja s.d. triwulan I tahun 2023 sebesar 100.

Target IKK “Skor IKPA Unit Kerja” tahun 2023 sebesar 95. Realisasi s.d. triwulan I tahun 2023 sebesar 100 atau mencapai 105,26% dari target tahun 2023 maupun akhir Renstra tahun 2020-2024 sebesar 95.

Skor IKPA diukur dengan skor Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan.

Perbandingan target dan realisasi IKK “Skor IKPA Unit Kerja” dapat dilihat pada Grafik 35.



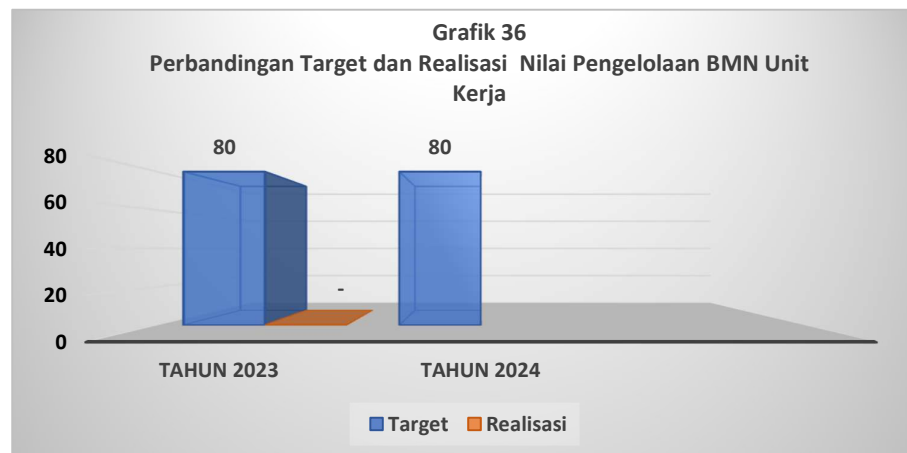
7) IKK: Nilai Pengelolaan BMN Unit Kerja

Belum ada realisasi Nilai Pengelolaan BMN Unit Kerja s.d. triwulan I tahun 2023

Target IKK “Nilai Pengelolaan BMN Unit Kerja” pada tahun 2023 sebesar 80. Belum ada realisasi s.d. triwulan I tahun 2023.

Pengelolaan BMN diukur berdasarkan hasil penilaian mandiri yang divalidasi oleh Biro Umum BPKP.

Target dan realisasi “Nilai Pengelolaan BMN Unit Kerja” dapat dilihat pada Grafik 36.



Rincian target dan realisasi *outcome* sesuai Perjanjian Kinerja Sampai dengan triwulan I tahun 2023 dapat dilihat pada Lampiran I.

3. Pelaksanaan Agenda Prioritas Pengawasan (APP), Agenda Prioritas Pengawasan Daerah (APPD), dan Agenda Prioritas *Enablers* Pengawasan (APEP)

a. Pelaksanaan APP

1) Pelaksanaan APP Sesuai Perkin tahun 2023

Berdasarkan Perkin tahun 2023, Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta mempunyai target topik APP tahun 2023 sebanyak 58 topik pengawasan dan target s.d. triwulan I tahun 2023 sebanyak 12 topik pengawasan. Setiap topik pengawasan yang telah terbit laporan hasil pengawasan harus dibuat Sintesa Hasil Pengawasan (SHP). Target dan realisasi SHP s.d. triwulan I tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4
Realisasi APP s.d. Triwulan I Tahun 2023

No.	Topik Pengawasan	Unit Kerja Rendal	Bidwas Pengampu				Keterangan
			IPP	APD	AN	Invest	
1	Akuntabilitas penanganan Covid-19	D203	VV	VV			
2	Transformasi data menuju Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek)	D205	-			-	Topik ini digeser oleh Rendal ke Tw 3. karena masih dalam tahapan analisis kebijakan dan pengumpulan data oleh PJ Tema dan kontributor Pusat.
3	Bauran Program Kesejahteraan Sosial	D203	v			-	Topik ini dengan pengampu Bidwas Investigasi digeser oleh Rendal ke Tw 2.3. dan 4 karena masih dalam tahapan analisis kebijakan dan pengumpulan data oleh PJ Tema dan kontributor Pusat.
4	Pembangunan Satu Data Indonesia (SDI)	D205	VV				
5	Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah Daerah	D301		v			
6	Percepatan Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah	D301	VV				
7	Efektivitas Pengendalian Inflasi Daerah	D302	VV				
8	Akuntabilitas Perencanaan Pembangunan Desa	D303	VV				
9	Akuntabilitas Keuangan Desa	D303	VV				
10	Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing UMKM	D104	v	VV			
11	Akses Permodalan UMKM	D104	v		VV		
12	P3DN	D504				VV	
13	Strategi Pengembangan Daya Saing Pariwisata	D104	VV	VV			
14	Pembangunan Infrastruktur Destinasi Pariwisata (DPSP dan KSPN)	D104	VV	VV			
15	Dukungan Pengembangan Pariwisata	D104	VV	VV			
16	Pengelolaan risiko sektor strategis nasional	D304	-				Menurut surat Deputi PKD Nomor PE.10.00/S-113/D3/04/2023 tanggal 27 Februari 2023 sektor energi pada PW 12 untuk triwulan I tidak di-tagging
17	Pengendalian Kecurangan dan Hambatan Kelancaran Pembangunan	D504				VV	
18	Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pemilu	D202	v			VV	

Ket:

VV: SHP telah ditandatangani secara elektronik dan diunggah pada aplikasi SIMA-X.

V: PDF SHP telah diunggah pada aplikasi SIMA-X, namun belum ditandatangani secara elektronik

Terdapat realisasi dua topik APP yang tidak ditargetkan di triwulan I tahun 2023 dalam Perkin Tahun 2023, sebagaimana disajikan pada Tabel 5.

Tabel 5
Realisasi APP yang Tidak Ditargetkan s.d. Triwulan I Tahun 2023

No.	Topik Pengawasan	Unit Kerja Rendal	Bidwas Pengampu				Keterangan
			IPP	APD	AN	Invest	
1	Akuntabilitas Pengadaan Logistik dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT)	D504				VV	
2	Supply Chain Komoditas Pangan	D502	v				

Ket:

VV: SHP telah ditandatangani secara elektronik dan diunggah pada aplikasi SIMA-X.

V: PDF SHP telah diunggah pada aplikasi SIMA-X, namun belum ditandatangani secara elektronik

2) Non Prioritas yang Tidak Ditargetkan dalam Perkin Tahun 2023

Terdapat sebanyak 3 topik dengan 4 SHP kategori non prioritas, sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 6.

Tabel 6
Realisasi Non Prioritas yang Tidak Ditargetkan s.d. Triwulan I tahun 2023

No.	Topik Pengawasan	Unit Kerja Rendal	Bidwas Pengampu				
			IPP	APD	AN	Invest	P3APIP
1	Pengawasan Proyek Strategis Nasional (Triwulanan)	D103	v		VV		
2	Pengawasan Tata Kelola Peredaran Obat	D203	VV				
3	Perencanaan, Analisis, Evaluasi dan Pelaporan	SU01					VV

Ket:

VV: SHP telah ditandatangani secara elektronik dan diunggah pada aplikasi SIMA-X.

V: PDF SHP telah diunggah pada aplikasi SIMA-X, namun belum ditandatangani secara elektronik

3) Pelaksanaan APPD Sesuai Perkin Tahun 2023

Berdasarkan Perkin tahun 2023, Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta memiliki target topik APPD tahun 2023 sebanyak dua topik pengawasan dan target s.d. triwulan I tahun 2023 sebanyak satu topik pengawasan. Realisasi s.d. triwulan I sebanyak satu topik pengawasan dengan satu SHP, yaitu Program Jogja *Smart Province* (JSP). SHP topik tersebut telah ditandatangani secara elektronik dan diunggah pada aplikasi SIMA-X.

4) Pelaksanaan APEP tahun 2023

Terdapat sebanyak lima topik dengan lima SHP kategori Agenda Non Prioritas Enabler yang tidak ditargetkan di triwulan I tahun 2023 dalam Perkin tahun 2023. Rincian SHP topik *enablers* dapat dilihat pada Tabel 7.

Tabel 7
Realisasi APEP yang Tidak Ditargetkan s.d. Triwulan I Tahun 2023

No.	Topik APEP	Unit Kerja Rendal	Bagian Umum (Pengampu)
1	Layanan Perencanaan, Keuangan, SDM, Komunikasi, dan Umum	SU01	VV
2	Layanan Penyelenggaraan SPIP dan RB	SU01	VV
3	Layanan Perkantoran	SU01	VV
4	Layanan Perkantoran	SU03	VV
5	Layanan Sarana Internal	SU05	VV

Ket : VV: SHP telah ditandatangani secara elektronik dan diunggah pada aplikasi SIMA-X.

4. Pelaksanaan Rencana Kegiatan Tahunan (RKT) Pengawasan (PKPT) yang Mendukung Pencapaian *Outcome* dalam Perjanjian Kinerja tahun 2023

a. Target Output Pengawasan

Berdasarkan Revisi RKAKL tahun 2023 tanggal 10 Maret 2023 dan Aplikasi SIMA sampai dengan 31 Maret 2023 target Pengawasan Perwakilan BPKP D.I.Yogyakarta tahun 2023 beserta anggarannya dapat dilihat pada Tabel 8.

Tabel 8
Target dan Anggaran Per RO BPKP D.I. Yogyakarta tahun 2023

No.	Kode	Program/Kegiatan/Rincian Output (RO)	Target RO	Anggaran (Rp)	Bidwas	Topik	PKPT
A	FAG	Pengawasan Pembangunan (Baseline)					
1	3701.FAG.711	Rekomendasi Hasil Koordinasi Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan, dan Tindak Lanjut	2	150.000.000	P3APIP	1	2
2	3701.FAG.U11	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Keuangan Negara, Daerah dan Desa	5	314.126.000	IPP	1	1
					APD	7	7
					Investigasi	1	1
3	3701.FAG.U31	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Kekayaan Negara/Daerah yang Dipisahkan dan BLU/BLUD	5	130.928.000	AN	6	7
Jumlah A			12	595.054.000		16	18
B	FAG	Pengawasan Pembangunan (Penambahan)					
1	3701.FAG.028	Rekomendasi Hasil Pengawasan Strategis Nasional/Daerah	23	925.898.000	IPP	14	14
					APD	11	11
					AN	3	3
					Investigasi	6	6
					P3APIP	1	1
Jumlah B			23	925.898.000		35	35
C	UAG	Pengawasan Pembangunan (Baseline)					
1	3701.UAG.U21	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Pembangunan Sumber Daya Manusia	8	317.520.000	IPP	9	9
					APD	3	3
					AN	2	2
2	3701.UAG.U22	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Infrastruktur dan Konektivitas	7	190.512.000	IPP	10	10
					APD	2	2
					AN	3	3
3	3701.UAG.U23	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Pembangunan Ekonomi	6	296.352.000	IPP	5	5
					APD	5	6
					AN	2	2
					Investigasi	1	1
4	3701.UAG.U24	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Ketahanan Pangan	1	42.336.000	IPP	1	1

No.	Kode	Program/Kegiatan/Rincian Output (RO)	Target RO	Anggaran (Rp)	Bidwas	Topik	PKPT
5	3701.UAG.U27	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Pembangunan Daerah	2	115.200.000	APD	2	2
6	3701.UAG.U41	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Pengendalian Kecurangan	2	35.280.000	Investigasi	1	1
7	3701.UAG.U52	Rekomendasi Hasil Pengawasan Manajemen Risiko atas Kualitas Pengendalian Intern Pemerintah Daerah	6	655.610.000	APD	2	2
					P3APIP	2	3
8	3701.UAG.U53	Rekomendasi Hasil Pengawasan Manajemen Risiko atas Kualitas Pengendalian Intern Badan Usaha	4	105.840.000	AN	1	1
Jumlah C			36	1.758.650.000		51	53
Jumlah			71	3.279.602.000		102	106

Keterangan:

*) Jumlah topik pengawasan dalam aplikasi SIMARen sebanyak 80 topik. Jumlah 102 topik pengawasan karena terdapat satu topik yang diampu oleh lebih dari satu bidang.

Rincian topik dapat dilihat pada Lampiran II.

b. Realisasi Rincian Output (RO) PKPT

Berdasarkan laporan PP 39 sampai dengan 31 Maret 2023 realisasi rincian output (berdasarkan SHP yang sudah final) disajikan pada Tabel 9.

Tabel 9
Target dan Realisasi RO Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta tahun 2023

No	Kode	Program/Kegiatan/Rincian Output (RO)	Target RO	Realisasi	Capaian (%)
A	FAG	Pengawasan Pembangunan (Baseline)			
1	3701.FAG.711	Rekomendasi Hasil Koordinasi Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan, dan Tindak Lanjut	2	-	-
2	3701.FAG.U11	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Keuangan Negara, Daerah dan Desa	5	3	60,00
3	3701.FAG.U31	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Kekayaan Negara/Daerah yang Dipisahkan dan BLU/BLUD	5	-	-
Jumlah A			12	3	25,00
B	FAG	Pengawasan Pembangunan (Penambahan)			
1	3701.FAG.028	Rekomendasi Hasil Pengawasan Strategis Nasional/Daerah	23	7	30,43
Jumlah B			23	7	30,43
C	UAG	Pengawasan Pembangunan (Baseline)			
1	3701.UAG.U21	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Pembangunan Sumber Daya Manusia	8	1	12,50

No	Kode	Program/Kegiatan/Rincian Output (RO)	Target RO	Realisasi	Capaian (%)
2	3701.UAG.U22	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Infrastruktur dan Konektivitas	7	-	-
3	3701.UAG.U23	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Pembangunan Ekonomi	6	6	100,00
4	3701.UAG.U24	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Ketahanan Pangan	1	-	-
5	3701.UAG.U27	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Pembangunan Daerah	2	1	50,00
6	3701.UAG.U41	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Pengendalian Kecurangan	2	1	50,00
7	3701.UAG.U52	Rekomendasi Hasil Pengawasan Manajemen Risiko atas Kualitas Pengendalian Intern Pemerintah Daerah	6	-	-
8	3701.UAG.U53	Rekomendasi Hasil Pengawasan Manajemen Risiko atas Kualitas Pengendalian Intern Badan Usaha	4	-	-
Jumlah C			36	9	25,00
Jumlah			71	19	26,76

c. Pelaksanaan Rencana Kegiatan Tahunan (RKT) Pengawasan (PKPT)

Berdasarkan data manual, s.d. tanggal akhir triwulan I tahun 2023 telah terbit 134 surat tugas (ST) dan 43 laporan atau 32,09 dari ST yang terbit. Realisasi PKPT s.d. triwulan I 2023 sebanyak 22 PKPT atau 20,75% dari rencana PKPT tahun 2023 sebanyak 106 PKPT. Realisasi PKPT mengacu pada penerbitan laporan. Rincian realisasi PKPT, penerbitan ST, dan penerbitan Laporan Hasil Pengawasan disajikan pada Tabel 10.

Tabel 10
Target dan Realisasi PKPT, ST, dan LHP Perwakilan BPKP DIY tahun 2023

No.	Bidang	Target	Realisasi			Capaian (%)	% Realisasi LHP Dibandingkan Realisasi ST
		PKPT	PKPT	ST	Lap	PKPT	
1	2	3	4	5	6	7=4/3	8=6/5
1	IPP	40	5	35	7	12,50	20,00
2	APD	33	12	43	22	36,36	51,16
3	AN	18	3	24	4	16,67	16,67
4	Investigasi	9	1	16	3	11,11	18,75
5	P3A	6	1	16	7	16,67	43,75
Jumlah		106	22	134	43	20,75	32,09

Berdasarkan Tabel 10, jumlah laporan terbit sebanyak 43 laporan, namun berdasarkan data pada aplikasi *New Monsima* belum ada data laporan terbit.

Dari hasil monitoring pada aplikasi *New Monsima* terdapat PKPT yang RMPnya sampai dengan 31 Maret 2023, namun belum diterbitkan surat tugasnya dapat dilihat pada Tabel 11.

Tabel 11
PKPT yang Belum Terbit ST Sesuai RMP s.d. 31 Maret 2023

No.	Bidwas	ID PKPT	Nama PKPT	RMP	RPL	Keterangan
1	APD	108488	Pengawasan atas Pengelolaan Risiko Sektor Strategis Nasional	1	3,6,9,12	Menurut surat Deputi PKD Nomor PE.10.00/S-113/D3/04/2023 tanggal 27 Februari 2023 sektor energi pada PW 12 untuk triwulan I tidak di-tagging
2	APD	113443	Workshop Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa	2	3,6,9,12	Akan dilaksanakan di Triwulan II
3	APD	114226	Pengawasan atas Peningkatan Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Daerah (SAKIP)	3	4	Akan dilaksanakan di Triwulan II
4	IPP	108413	Pengawasan atas Infrastruktur Sistem Pengolahan Air Limbah (SPAL) dan Sanitasi	2	3,12	Menunggu arahan dari Rendal
5	P3APIP	113441	Perencanaan, Analisis, Evaluasi dan Pelaporan (PAEP dan P3A) - Koordinasi dan Perencanaan Pengawasan	1	3,6,9,12	Belum ada kegiatan Forum Pusat dan Koordinasi Pembinaan JFA dari Pusbin JFA

d. Target dan Realisasi Program Kegiatan Administrasi Umum (PKAU)

Realisasi PKAU Triwulan I tahun 2023 sebanyak tujuh laporan/dokumen, dengan rincian sebagaimana disajikan pada Tabel 12.

Tabel 12
Target dan Realisasi PKAU Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta tahun 2023

No.	Nama PKAU	Target 2023 (lap/dok)	Realisasi	Capaian
1	Penyusunan RKA dan Revisi	1	1	100
2	Pengelolaan Pertanggungjawaban Anggaran	1	-	-
3	Penyusunan Laporan KLPBU	1	-	-
4	Pengelolaan Publikasi dan Kehumasan	4	1	25
5	Gaji dan Tunjangan	1	-	-
6	Operasional Pemeliharaan Perkantoran	12	3	25
7	Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	1	-	-
8	Penilaian Angka Kredit	2	-	-
9	Pengadaan Barang dan Jasa	4	1	25
10	Penyelenggaraan SPIP dan MR	1	-	-
11	Penyusunan Bahan Perencanaan, RKT dan Perkin	1	-	-
12	Penyusunan Laporan Kinerja Triwulanan	3	-	-
13	Penyusunan Laporan Kinerja Tahunan	1	1	100
14	Penyelenggaraan RB dan ZI	1	-	-
Jumlah		34	7	20,59

e. Penggunaan Hari Produktif

Realisasi penggunaan hari produktif pengawasan PKPT Sampai dengan triwulan I tahun 2023 adalah sebanyak 3.068 OH atau 15,49% dari rencana hari pengawasan satu tahun sebanyak 19.802 OH dengan rincian sebagaimana disajikan pada Tabel 13.

Tabel 13
Target dan Realisasi OH Pengawasan Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta

No.	Bidwas	Target OH	Realisasi OH	%
1	IPP	4.054	1.034	25,51
2	APD	2.282	879	38,52
3	AN	1.998	532	26,63
4	Investigasi	1.530	455	29,74
5	P3A	9.938	168	1,69
	Jumlah	19.802	3.068	15,49

f. Penyerapan Anggaran

Realisasi anggaran s.d. triwulan I tahun 2023 sebesar Rp6.534.096.013,00 atau 19,67% dari anggaran tahun 2023 sebesar Rp33.210.975.000,00. Realisasi tersebut terdiri dari realisasi anggaran program pengawasan pembangunan sebesar Rp327.486.469,00 dan realisasi program dukungan pengawasan sebesar Rp6.206.609.544,00. Total realisasi anggaran program pengawasan pembangunan adalah sebesar Rp327.486.469,00 atau 9,99% dari anggaran pengawasan sebesar Rp3.279.602.000,00. Sedangkan realisasi anggaran program dukungan pengawasan adalah sebesar Rp6.206.609.544,00 atau 20,74% dari anggaran dukungan pengawasan sebesar Rp29.931.373.000,00. Rincian anggaran dan realisasi anggaran disajikan pada Tabel 14.

Tabel 14
Anggaran dan Realisasi Anggaran Perwakilan BPKP DIY tahun 2023

No.	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	Program Pengawasan Pembangunan (CH)	3.279.602.000	327.486.469	9,99
2	Program Dukungan Manajemen (WA)	29.931.373.000	6.206.609.544	20,74
	Jumlah	33.210.975.000	6.534.096.013	19,67

Realisasi anggaran s.d. triwulan I tahun 2023 secara rinci dapat dilihat pada Lampiran III.

g. Hal-hal yang perlu diperhatikan

Sebagaimana diuraikan di atas, terdapat beberapa hal-hal yang perlu diperhatikan sebagai berikut:

- Terdapat SHP yang diunggah pada aplikasi SIMA-X, namun masih berupa draft/belum ditandatangani secara elektronik oleh Kepala Perwakilan;
- Belum terdapat data laporan terbit pada aplikasi New Monsima, sedangkan secara manual telah terbit laporan sebanyak 43 laporan;
- Penyerapan anggaran Program Pengawasan Pembangunan masih rendah yaitu sebesar 9,99% dari anggaran;
- Terdapat PKPT yang RMPnya sampai dengan bulan Maret 2023 namun belum diterbitkan surat tugasnya sebanyak 5 PKPT yaitu Bidang APD sebanyak 3 PKPT Bidang IPP sebanyak 1 PKPT, dan Bidang P3APIP. Sebanyak satu PKPT APD tidak di-tagging oleh Rendal, 2 PKPT APD akan dilakukan di Triwulan II, sebanyak satu PKPT IPP masih menunggu arahan dari Rendal dan 1 PKPT P3APIP belum ada kegiatan Forum Pusat dan Koordinasi Pembinaan JFA dari Pusbin JFA.

h. Usulan/Saran Perbaikan

Atas hal-hal yang perlu diperhatikan di atas, kami menyampaikan usulan/saran sebagai berikut:

- Bidang-bidang agar segera mengunggah SHP yang telah ditandatangani secara elektronik oleh Kepala Perwakilan pada aplikasi SIMA-X;
- Bidang agar segera meng-*input* atribut laporan di menu penyusunan laporan dan mengunggah laporan yang telah terbit pada aplikasi SIMA POR;
- Semua Bidang Pengawasan segera mempercepat penyerapan anggaran;
- Bidang teknis terkait agar lebih aktif berkomunikasi dengan Rendal, terkait PKPT yang belum ada pedoman.

Demikian kami sampaikan Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta s.d. triwulan I tahun 2023. Atas perkenan Bapak Kepala Perwakilan, kami ucapkan terima kasih.

Korwas Bidang P3A,


Ratna Wjihastuti

**Target dan Realisasi Outcome Sesuai Perjanjian Kinerja
Sampai Dengan Triwulan I Tahun 2023
Perwakilan BPKP DIY**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target			Realisasi			
			Satuan	2023	2024	TW I Tahun 2023	% Realisasi thd target 2023	% Realisasi thd target 2024	
1	2	3	4	6	6	5	7	8	
1	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Keuangan Negara/Daerah	1.1	Nilai optimalisasi penerimaan daerah yang terealisasi	Rupiah (Juta)	2.494,00	1.029,00	-	-	-
		1.2	Nilai efisiensi pengeluaran negara dan daerah	Rupiah (Juta)	136.261,00	112.939,00	127.383,30	93,48	112,79
		1.3	Nilai penyelamatan keuangan negara dan daerah	Rupiah (Juta)	56.684,00	103.964,00	170,98	0,30	0,16
2	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Pembangunan Nasional	2.1	Jumlah Proyek Strategis Nasional yang tercapai sesuai target	PSN	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
		2.2	Persentase hambatan pelaksanaan pembangunan yang diselesaikan	(%) Persen	85,00	85,00	-	-	-
		2.3	Jumlah Kegiatan Pembangunan Prioritas Daerah yang Diawasi	Kegiatan Prioritas Daerah	2,00	9,00	1,00	50,00	11,11
3	Meningkatnya Kesadaran perbaikan tata kelola pemerintahan pada K/L/D/BU yang menjadi tanggung jawab Perwakilan BPKP	3.1	Persentase rekomendasi strategis yang ditindaklanjuti	(%) Persen	80,00	80,00	-	-	-
4	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Badan Usaha	4.1	Jumlah BUMD dengan pengelolaan korporasinya baik	BUMD	1,00	2,00	1,00	100,00	50,00
		4.2	Jumlah BUMD dengan kinerja sehat	BUMD	11,00	11,00	1,00	9,09	9,09
		4.3	Jumlah BLUD dengan kinerja sehat	BLUD	2,00	2,00	-	-	-
		4.4	Jumlah BUMDes yang mampu menyusun laporan	BUMDes	35,00	26,00	-	-	-
		4.5	Jumlah BUMDes yang memberikan kontribusi pada perekonomian desa	BUMDes	10,00	-	-	-	-
5	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Efektivitas Pengendalian Korupsi	5.1	Persentase hasil pengawasan represif yang dimanfaatkan/ditindaklanjuti	(%) Persen	100,00	100,00	-	-	-
		5.2	Persentase hasil Pengawasan preventif dan edukatif yang dimanfaatkan/ ditindaklanjuti	(%) Persen	85,00	90,00	-	-	-
		5.3	Jumlah Pemda dengan efektivitas pengendalian korupsi Baik	Pemda	3,00	8,00	8	266,67	100,00
		5.4	Jumlah Badan Usaha dengan efektivitas pengendalian korupsi Baik	Badan Usaha	1,00	2,00	-	-	-
6	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Kualitas Pengendalian Intern K/L/P/BU	6.1	Jumlah APIP Provinsi dengan Kapabilitas APIP >= Level 3	Provinsi	1,00	1,00	1	100,00	100,00
		6.2	Jumlah APIP Kabupaten/Kota dengan Kapabilitas APIP >= Level 3	Kabupaten/Kota	11,00	11,00	11	100,00	100,00
		6.3	Jumlah Provinsi dengan Maturitas SPIP >= Level 3	Provinsi	1,00	1,00	1	100,00	100,00
		6.4	Jumlah Kabupaten/Kota dengan Maturitas SPIP >= Level 3	Kabupaten/Kota	11,00	11,00	10	90,91	90,91
		6.5	Jumlah Provinsi dengan MRI >= Level 3	Provinsi	1,00	1,00	1	100,00	100,00
		6.6	Jumlah Kab/Kota dengan MRI >= Level 3	Kabupaten/Kota	5,00	8,00	3	60,00	37,50
		6.7	Jumlah Pemda yang akuntabel dalam pengelolaan keuangan dan kinerja daerah	Pemda	9,00	9,00	-	-	-
		6.8	Jumlah Desa yang pengelolaan keuangannya akuntabel	Desa	25,00	-	20	80,00	-
		6.9	Jumlah desa yang menerapkan pengelolaan aset desa secara memadai	Desa	25,00	511,00	246	984,00	48,14
		6.10	Jumlah BUMD dengan MRI >= Level 3	BUMD	1,00	2,00	-	-	-
		6.11	Jumlah BLU/D dengan MRI >= Level 3	BLU/D	5,00	7,00	4	80,00	57,14
		6.12	Jumlah BUMD dengan Kapabilitas SPI >= Level 3	BUMD	2,00	1,00	1	50,00	100,00
		6.13	Jumlah BLU/D dengan Kapabilitas SPI >= Level 3	BLU/D	1,00	1,00	2	200,00	200,00
7	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Unit Kerja	7.1	Nilai Skor Zona Integritas Unit Kerja	Skor Skala 100	75,00	90,00	-	-	-
		7.2	Nilai SAKIP Unit Kerja	(%) Persen	82,00	84,00	-	-	-
		7.3	Persentase Efektivitas Pengendalian Intern Unit Kerja (SPIP Unit Kerja)	(%) Persen	70,00	70,00	-	-	-
		7.4	Persentase Penyelesaian RTP (MRI Unit Kerja)	(%) Persen	100,00	100,00	-	-	-
		7.5	Indeks Kualitas Layanan Eksternal Unit Kerja	Indeks Skala 100	75,00	81,00	-	-	-
		7.6	Skor IKPA Unit Kerja	Indeks Skala 100	95,00	95,00	100	105,26	105,26
		7.7	Nilai Pengelolaan BMN Unit Kerja	Indeks Skala 100	80,00	80,00	-	-	-

**JUMLAH TOPIK TAHUN 2023 PADA APLIKASI SIMAREN
PERWAKILAN BPKP D.I. YOGYAKARTA**

No.	Topik	Bidwas	ID PKPT	Kode RO
1	Akses Permodalan UMKM	AN	110385	3701.UAG.00.U23
		IPP	108417	3701.UAG.00.U23
2	Akuntabilitas dan Tata Kelola Keuangan BUMDesa	AN	113067	3701.FAG.00.U31
3	Akuntabilitas Keuangan Negara/Daerah	Investigasi	114522	3701.FAG.00.U11
4	Akuntabilitas penanganan Covid-19	APD	115035	3701.UAG.00.U21
		IPP	108408	3701.UAG.00.U21
5	Akuntabilitas Pengadaan Logistik dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT)	Investigasi	108641	3701.FAG.51.028
6	Akuntabilitas Pengamanan dan Pengawasan	IPP	108653	3701.FAG.51.028
7	Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pemilu	AN	109766	3701.FAG.51.028
		Investigasi	114217	3701.FAG.51.028
		IPP	108400	3701.FAG.51.028
8	Akuntabilitas Perencanaan Pembangunan Desa	APD	108392	3701.FAG.51.028
9	Akuntabilitas Aset Desa	APD	108386	3701.FAG.51.028
10	Akuntabilitas Keuangan Desa	APD	108385	3701.FAG.00.U11
11	Analisis Fiskal dan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	APD	114229	3701.FAG.00.U11
12	Audit atas Pinjaman dan Bantuan Luar Negeri	IPP	114223	3701.FAG.51.028
13	Audit Kinerja Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Sanitasi di Lembaga Pendidikan Keagamaan (LPK)	IPP	114682	3701.UAG.00.U22
14	Audit Kinerja Pengembangan Infrastruktur Sosial ekonomi Wilayah (PISEW)	IPP	114220	3701.UAG.00.U22
15	Bantuan Operasional Sekolah	IPP	108367	3701.UAG.00.U21
16	Bauran Program Kesejahteraan Sosial	Investigasi	114205	3701.FAG.51.028
		IPP	108398	3701.FAG.51.028
17	Bimtek Implementasi FMIS Pada Pemda	APD	114225	3701.FAG.00.U11
18	BLU/D (Fokus pada BLU/D Layanan Kesehatan - Rumah Sakit dan BLU/D Pengelolaan Dana)	AN	108381	3701.FAG.00.U31
19	BUMD (Fokus pada Bank Pembangunan Daerah)	AN	108377	3701.FAG.00.U31
20	BUMD (Fokus pada BU Jasa Air)	AN	109043	3701.FAG.00.U31
21	BUMD (Fokus pada BUMD Aneka Usaha)	AN	109049	3701.FAG.00.U31
22	BUMN	AN	108515	3701.FAG.00.U31
			112056	3701.FAG.00.U31
23	Dukungan Pengembangan Pariwisata	APD	111622	3701.UAG.00.U23
			112059	3701.UAG.00.U23
		IPP	108414	3701.UAG.00.U23
24	Efektivitas Pengendalian Inflasi Daerah	APD	108364	3701.FAG.51.028
25	Efektivitas Pengentasan Kemiskinan Ekstrem	APD	109000	3701.FAG.51.028
		IPP	108393	3701.FAG.51.028
26	Efektivitas Transfer ke Daerah	APD	108404	3701.FAG.51.028
27	Implementasi Bansos APBD	APD	108532	3701.FAG.51.028
28	Implementasi Bansos APBDesa	APD	108389	3701.FAG.51.028
29	Infrastruktur Jalan Tol	IPP	108607	3701.UAG.00.U22
30	Infrastruktur Sistem Pengolahan Air Limbah (SPAL) dan sanitasi	IPP	108413	3701.UAG.00.U22
31	Infrastruktur SPAM	AN	108970	3701.UAG.00.U22
		IPP	108636	3701.UAG.00.U22
32	Kapabilitas APIP - Pemerintah Daerah	P3APIP	108371	3701.UAG.00.U52
33	Kemudahan Perizinan Berusaha	IPP	108379	3701.FAG.51.028
34	Kinerja Pendidikan Tinggi	AN	108969	3701.FAG.51.028
		IPP	108581	3701.FAG.51.028

No.	Topik	Bidwas	ID PKPT	Kode RO
35	Manajemen Risiko Badan Usaha	AN	109756	3701.UAG.00.U53
36	Maturitas SPIP/MRI - Pemerintah Daerah	APD	108597	3701.UAG.00.U52
37	Optimalisasi PAD	APD	108369	3701.FAG.00.U11
38	P3DN	APD	114215	3701.UAG.00.U23
		AN	110430	3701.UAG.00.U23
		Investigasi	108383	3701.UAG.00.U23
39	Pembangunan Bandara	AN	108982	3701.UAG.00.U22
		IPP	108406	3701.UAG.00.U22
40	Pembangunan Infrastruktur Destinasi Pariwisata (DPSP dan KSPN)	APD	108978	3701.UAG.00.U23
		IPP	108415	3701.UAG.00.U23
41	Pembangunan Jalan dan Jembatan	APD	111685	3701.UAG.00.U22
42	Pembangunan Satu Data Indonesia (SDI)	IPP	108536	3701.FAG.51.028
43	Pemerataan dan Penyediaan Infrastruktur, Akses Internet dan Komunikasi	IPP	108608	3701.UAG.00.U22
44	Penanganan Pasca Panen	Investigasi	108625	3701.FAG.51.028
45	Penanggulangan Hama dan Penyakit	IPP	115034	3701.UAG.00.U24
46	Pengadaan ASN Tahun 2023	IPP	114218	3701.FAG.51.028
47	Pengawasan atas Pengendalian Intern Tata Kelola Desa	APD	113443	3701.UAG.00.U52
48	Pengawasan Proyek Strategis Nasional (Triwulanan)	AN	114219	3701.UAG.00.U22
		IPP	113438	3701.UAG.00.U22
49	Pengawasan Tata Kelola Peredaran Obat	IPP	114550	3701.UAG.00.U21
50	Pengelolaan risiko sektor strategis nasional	APD	108488	3701.FAG.51.028
51	Pengendalian Kecurangan dan Hambatan Kelancaran Pembangunan	Investigasi	108365	3701.UAG.00.U41
52	Penguatan Inovasi dan Teknologi Kesehatan (Digitalisasi Layanan Kesehatan)	IPP	108388	3701.FAG.51.028
53	Penguatan Sistem Pengendalian Penyakit	IPP	108396	3701.FAG.51.028
54	Peningkatan Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Daerah (SAKIP)	APD	114226	3701.FAG.00.U11
55	Peningkatan Kualitas Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (SISWASKEUDES)	P3APIP	114517	3701.FAG.51.028
56	Peningkatan Kualitas Pengelolaan JFA	P3APIP	113439	3701.UAG.00.U52
			113440	3701.UAG.00.U52
57	Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan Desa (SISKEUDES)	APD	114515	3701.FAG.51.028
58	Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah Daerah	APD	108372	3701.FAG.00.U11
59	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Aset Desa	APD	114520	3701.FAG.51.028
60	Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing UMKM	APD	108975	3701.UAG.00.U23
		IPP	108418	3701.UAG.00.U23
61	Peningkatan Sarana Prasarana (Sarpras) Pendidikan	IPP	108416	3701.UAG.00.U21
62	Percepatan Penurunan Stunting	APD	109015	3701.UAG.00.U21
		IPP	108362	3701.UAG.00.U21
63	Percepatan Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah	APD	108370	3701.FAG.00.U11
64	Perencanaan, Analisis, Evaluasi dan Pelaporan (PAEP dan P3A)	P3APIP	113441	3701.FAG.00.711
			113442	3701.FAG.00.711
65	Program Ekonomi Biru DIY	APD	108234	3701.UAG.00.U27
66	Program Jogja Smart Province (JSP)	APD	108259	3701.UAG.00.U27
67	Program Pembangunan Perumahan Rakyat (Perumahan Khusus dan Rumah Susun, Bantuan Simultan Perumahan Rakyat)	APD	111603	3701.UAG.00.U22
68	Reformasi sistem kesehatan - kualitas dan redistribusi nakes	IPP	108397	3701.UAG.00.U21
69	Reformasi sistem kesehatan - layanan primer	IPP	108402	3701.UAG.00.U21
70	Reformasi sistem kesehatan - layanan rujukan	APD	111612	3701.UAG.00.U21

No.	Topik	Bidwas	ID PKPT	Kode RO
		AN	108984	3701.UAG.00.U21
		IPP	108399	3701.UAG.00.U21
71	Reviu atas Laporan Verifikasi Konsultan atas Program Hibah Air Limbah Setempat	IPP	114222	3701.UAG.00.U22
72	Reviu atas Laporan Verifikasi Konsultan atas Program Hibah Air Minum Perdesaan	IPP	114221	3701.UAG.00.U22
73	Sistem Kesehatan Nasional	AN	108990	3701.UAG.00.U21
		IPP	108642	3701.UAG.00.U21
74	Skema Kesehatan Adaptif	IPP	108647	3701.FAG.51.028
75	Strategi Pengembangan Daya Saing Pariwisata	APD	112860	3701.UAG.00.U23
		IPP	108805	3701.UAG.00.U23
76	Supply Chain Komoditas Pangan	Investigasi	108631	3701.FAG.51.028
		IPP	114963	3701.FAG.51.028
77	Tata Kelola Cadangan Pangan Pemerintah Daerah	APD	108550	3701.FAG.51.028
78	Tata Kelola Cadangan Pangan Pemerintah Pusat	AN	109927	3701.FAG.51.028
79	Transformasi data menuju Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek)	Investigasi	114203	3701.FAG.51.028
		IPP	111591	3701.FAG.51.028
80	Verifikasi atas Capaian Disbursement Linked Indicators (DLI) Pinjaman dan Bantuan Luar Negeri	IPP	114224	3701.FAG.00.U11
	Jumlah	102	106	

**JUMLAH TOPIK TAHUN 2023 PADA APLIKASI SIMAREN
PERWAKILAN BPKP D.I. YOGYAKARTA**

No.	Topik	Bidwas	ID PKPT	Kode RO
1	Akses Permodalan UMKM	AN	110385	3701.UAG.00.U23
		IPP	108417	3701.UAG.00.U23
2	Akuntabilitas dan Tata Kelola Keuangan BUMDesa	AN	113067	3701.FAG.00.U31
3	Akuntabilitas Keuangan Negara/Daerah	Investigasi	114522	3701.FAG.00.U11
4	Akuntabilitas penanganan Covid-19	APD	115035	3701.UAG.00.U21
		IPP	108408	3701.UAG.00.U21
5	Akuntabilitas Pengadaan Logistik dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT)	Investigasi	108641	3701.FAG.51.028
6	Akuntabilitas Pengamanan dan Pengawasan	IPP	108653	3701.FAG.51.028
7	Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pemilu	AN	109766	3701.FAG.51.028
		Investigasi	114217	3701.FAG.51.028
		IPP	108400	3701.FAG.51.028
8	Akuntabilitas Perencanaan Pembangunan Desa	APD	108392	3701.FAG.51.028
9	Akuntabilitas Aset Desa	APD	108386	3701.FAG.51.028
10	Akuntabilitas Keuangan Desa	APD	108385	3701.FAG.00.U11
11	Analisis Fiskal dan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	APD	114229	3701.FAG.00.U11
12	Audit atas Pinjaman dan Bantuan Luar Negeri	IPP	114223	3701.FAG.51.028
13	Audit Kinerja Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Sanitasi di Lembaga Pendidikan Keagamaan (LPK)	IPP	114682	3701.UAG.00.U22
14	Audit Kinerja Pengembangan Infrastruktur Sosial ekonomi Wilayah (PISEW)	IPP	114220	3701.UAG.00.U22
15	Bantuan Operasional Sekolah	IPP	108367	3701.UAG.00.U21
16	Bauran Program Kesejahteraan Sosial	Investigasi	114205	3701.FAG.51.028
		IPP	108398	3701.FAG.51.028
17	Bimtek Implementasi FMIS Pada Pemda	APD	114225	3701.FAG.00.U11
18	BLU/D (Fokus pada BLU/D Layanan Kesehatan - Rumah Sakit dan BLU/D Pengelolaan Dana)	AN	108381	3701.FAG.00.U31
19	BUMD (Fokus pada Bank Pembangunan Daerah)	AN	108377	3701.FAG.00.U31
20	BUMD (Fokus pada BU Jasa Air)	AN	109043	3701.FAG.00.U31
21	BUMD (Fokus pada BUMD Aneka Usaha)	AN	109049	3701.FAG.00.U31
22	BUMN	AN	108515	3701.FAG.00.U31
			112056	3701.FAG.00.U31
23	Dukungan Pengembangan Pariwisata	APD	111622	3701.UAG.00.U23
			112059	3701.UAG.00.U23
		IPP	108414	3701.UAG.00.U23
24	Efektivitas Pengendalian Inflasi Daerah	APD	108364	3701.FAG.51.028
25	Efektivitas Pengentasan Kemiskinan Ekstrem	APD	109000	3701.FAG.51.028
		IPP	108393	3701.FAG.51.028
26	Efektivitas Transfer ke Daerah	APD	108404	3701.FAG.51.028
27	Implementasi Bansos APBD	APD	108532	3701.FAG.51.028
28	Implementasi Bansos APBDesa	APD	108389	3701.FAG.51.028
29	Infrastruktur Jalan Tol	IPP	108607	3701.UAG.00.U22
30	Infrastruktur Sistem Pengolahan Air Limbah (SPAL) dan sanitasi	IPP	108413	3701.UAG.00.U22
31	Infrastruktur SPAM	AN	108970	3701.UAG.00.U22
		IPP	108636	3701.UAG.00.U22
32	Kapabilitas APIP - Pemerintah Daerah	P3APIP	108371	3701.UAG.00.U52
33	Kemudahan Perizinan Berusaha	IPP	108379	3701.FAG.51.028
34	Kinerja Pendidikan Tinggi	AN	108969	3701.FAG.51.028
		IPP	108581	3701.FAG.51.028

No.	Topik	Bidwas	ID PKPT	Kode RO
35	Manajemen Risiko Badan Usaha	AN	109756	3701.UAG.00.U53
36	Maturitas SPIP/MRI - Pemerintah Daerah	APD	108597	3701.UAG.00.U52
37	Optimalisasi PAD	APD	108369	3701.FAG.00.U11
38	P3DN	APD	114215	3701.UAG.00.U23
		AN	110430	3701.UAG.00.U23
		Investigasi	108383	3701.UAG.00.U23
39	Pembangunan Bandara	AN	108982	3701.UAG.00.U22
		IPP	108406	3701.UAG.00.U22
40	Pembangunan Infrastruktur Destinasi Pariwisata (DPSP dan KSPN)	APD	108978	3701.UAG.00.U23
		IPP	108415	3701.UAG.00.U23
41	Pembangunan Jalan dan Jembatan	APD	111685	3701.UAG.00.U22
42	Pembangunan Satu Data Indonesia (SDI)	IPP	108536	3701.FAG.51.028
43	Pemerataan dan Penyediaan Infrastruktur, Akses Internet dan Komunikasi	IPP	108608	3701.UAG.00.U22
44	Penanganan Pasca Panen	Investigasi	108625	3701.FAG.51.028
45	Penanggulangan Hama dan Penyakit	IPP	115034	3701.UAG.00.U24
46	Pengadaan ASN Tahun 2023	IPP	114218	3701.FAG.51.028
47	Pengawasan atas Pengendalian Intern Tata Kelola Desa	APD	113443	3701.UAG.00.U52
48	Pengawasan Proyek Strategis Nasional (Triwulanan)	AN	114219	3701.UAG.00.U22
		IPP	113438	3701.UAG.00.U22
49	Pengawasan Tata Kelola Peredaran Obat	IPP	114550	3701.UAG.00.U21
50	Pengelolaan risiko sektor strategis nasional	APD	108488	3701.FAG.51.028
51	Pengendalian Kecurangan dan Hambatan Kelancaran Pembangunan	Investigasi	108365	3701.UAG.00.U41
52	Penguatan Inovasi dan Teknologi Kesehatan (Digitalisasi Layanan Kesehatan)	IPP	108388	3701.FAG.51.028
53	Penguatan Sistem Pengendalian Penyakit	IPP	108396	3701.FAG.51.028
54	Peningkatan Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Daerah (SAKIP)	APD	114226	3701.FAG.00.U11
55	Peningkatan Kualitas Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (SISWASKEUDES)	P3APIP	114517	3701.FAG.51.028
56	Peningkatan Kualitas Pengelolaan JFA	P3APIP	113439	3701.UAG.00.U52
			113440	3701.UAG.00.U52
57	Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan Desa (SISKEUDES)	APD	114515	3701.FAG.51.028
58	Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah Daerah	APD	108372	3701.FAG.00.U11
59	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Aset Desa	APD	114520	3701.FAG.51.028
60	Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing UMKM	APD	108975	3701.UAG.00.U23
		IPP	108418	3701.UAG.00.U23
61	Peningkatan Sarana Prasarana (Sarpras) Pendidikan	IPP	108416	3701.UAG.00.U21
62	Percepatan Penurunan Stunting	APD	109015	3701.UAG.00.U21
		IPP	108362	3701.UAG.00.U21
63	Percepatan Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah	APD	108370	3701.FAG.00.U11
64	Perencanaan, Analisis, Evaluasi dan Pelaporan (PAEP dan P3A)	P3APIP	113441	3701.FAG.00.711
			113442	3701.FAG.00.711
65	Program Ekonomi Biru DIY	APD	108234	3701.UAG.00.U27
66	Program Jogja Smart Province (JSP)	APD	108259	3701.UAG.00.U27
67	Program Pembangunan Perumahan Rakyat (Perumahan Khusus dan Rumah Susun, Bantuan Simultan Perumahan Rakyat)	APD	111603	3701.UAG.00.U22
68	Reformasi sistem kesehatan - kualitas dan redistribusi nakes	IPP	108397	3701.UAG.00.U21
69	Reformasi sistem kesehatan - layanan primer	IPP	108402	3701.UAG.00.U21
70	Reformasi sistem kesehatan - layanan rujukan	APD	111612	3701.UAG.00.U21

No.	Topik	Bidwas	ID PKPT	Kode RO
		AN	108984	3701.UAG.00.U21
		IPP	108399	3701.UAG.00.U21
71	Reviu atas Laporan Verifikasi Konsultan atas Program Hibah Air Limbah Setempat	IPP	114222	3701.UAG.00.U22
72	Reviu atas Laporan Verifikasi Konsultan atas Program Hibah Air Minum Perdesaan	IPP	114221	3701.UAG.00.U22
73	Sistem Kesehatan Nasional	AN	108990	3701.UAG.00.U21
		IPP	108642	3701.UAG.00.U21
74	Skema Kesehatan Adaptif	IPP	108647	3701.FAG.51.028
75	Strategi Pengembangan Daya Saing Pariwisata	APD	112860	3701.UAG.00.U23
		IPP	108805	3701.UAG.00.U23
76	Supply Chain Komoditas Pangan	Investigasi	108631	3701.FAG.51.028
		IPP	114963	3701.FAG.51.028
77	Tata Kelola Cadangan Pangan Pemerintah Daerah	APD	108550	3701.FAG.51.028
78	Tata Kelola Cadangan Pangan Pemerintah Pusat	AN	109927	3701.FAG.51.028
79	Transformasi data menuju Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek)	Investigasi	114203	3701.FAG.51.028
		IPP	111591	3701.FAG.51.028
80	Verifikasi atas Capaian Disbursement Linked Indicators (DLI) Pinjaman dan Bantuan Luar Negeri	IPP	114224	3701.FAG.00.U11
	Jumlah	102	106	

Anggaran dan Realisasi Anggaran Per RO s.d. Maret Tahun 2023
Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta

No.	Kode RO	Nama RO	Anggaran Tahun 2023	Realisasi s.d. 28 Februari 2023	Capaian Penyerapan
			(Rp)	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6=5/4
A	089.01.CH	Program Pengawasan Pembangunan			
1	3701.FAG.711	Rekomendasi Hasil Koordinasi Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan, dan Tindak Lanjut	150,000,000	-	-
2	3701.FAG.U11	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Keuangan Negara, Daerah dan Desa	314,126,000	23,122,480	7.36
3	3701.FAG.U31	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Kekayaan Negara/Daerah yang Dipisahkan dan BLU/BLUD	130,928,000	20,788,260	15.88
		Sub Jumlah A	595,054,000	43,910,740	7.38
B	089.01.CH	Program Pengawasan Pembangunan			
1	3701.FAG.028	Rekomendasi Hasil Pengawasan Strategis Nasional/Daerah	925,898,000	70,236,153	7.59
		Sub Jumlah B	925,898,000	70,236,153	7.59
C	089.01.CH	Program Pengawasan Pembangunan			
1	3701.UAG.U21	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Pembangunan Sumber Daya Manusia	317,520,000	24,346,340	7.67
2	3701.UAG.U22	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Infrastruktur dan Konektivitas	190,512,000	11,232,052	5.90
3	3701.UAG.U23	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Pembangunan Ekonomi	296,352,000	58,747,470	19.82
4	3701.UAG.U24	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Ketahanan Pangan	42,336,000	9,500,000	22.44
5	3701.UAG.U27	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Pembangunan Daerah	115,200,000	36,781,090	31.93
6	3701.UAG.U41	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Pengendalian Kecurangan	35,280,000	10,590,000	30.02
7	3701.UAG.U52	Rekomendasi Hasil Pengawasan Manajemen Risiko atas Kualitas Pengendalian Intern Pemerintah Daerah	655,610,000	13,429,200	2.05
8	3701.UAG.U53	Rekomendasi Hasil Pengawasan Manajemen Risiko atas Kualitas Pengendalian Intern Badan Usaha	105,840,000	48,713,424	46.03
		Sub Jumlah C	1,758,650,000	213,339,576	12.13
		Jumlah Program Pengawasan Pembangunan	3,279,602,000	327,486,469	9.99
	089.01.WA	Program Dukungan Manajemen			
1	3676.EBA.962	Layanan Umum	547,530,000	72,970,734	13.33
2	3676.EBA.994	Layanan Perkantoran	29,283,843,000	6,133,638,810	20.95
3	3676.EBB.951	Layanan Sarana Internal	100,000,000	-	-
		Jumlah Program Dukungan Manajemen	29,931,373,000	6,206,609,544	20.74
		Jumlah	33,210,975,000	6,534,096,013	19.67